

**LATAR BELAKANG KOREA SELATAN DALAM MENYEPAKATI  
KERJASAMA *GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION*  
*AGREEMENT* (GSOMIA) DENGAN JEPANG TAHUN 2016**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NGAFIFATUL KHANAFI**

**151180019**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**LATAR BELAKANG KOREA SELATAN DALAM MENYEPAKATI  
KERJASAMA *GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION*  
*AGREEMENT* (GSOMIA) DENGAN JEPANG TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu  
Hubungan Internasional**



**Oleh :**

**NGAFIFATUL KHANAFI**

**151180019**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : NGAFIFATUL KHANAFI  
NIM : 151180019  
JUDUL SKRIPSI : LATAR BELAKANG KOREA SELATAN DALAM  
MENYEPAKATI KERJASAMA *GENERAL SECURITY OF  
MILITARY INFORMATION AGREEMENT* (GSOMIA)  
DENGAN JEPANG TAHUN 2016

Skripsi ini telah Disetujui untuk Diujikan  
Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Agustus 2022

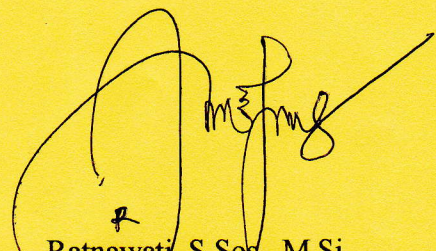
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Erna Kurniawati, SIP., M.Si  
NIP. 196712082021212002



Ratnawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 196902022021212002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NGAFIFATUL KHANAFI  
NIM : 151180019  
JUDUL SKRIPSI : LATAR BELAKANG KOREA SELATAN DALAM  
MENYEPAKATI KERJASAMA *GENERAL SECURITY OF  
MILITARY INFORMATION AGREEMENT (GSOMIA)*  
DENGAN JEPANG TAHUN 2016

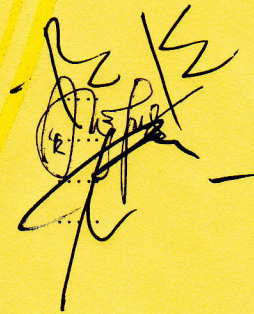
Skripsi ini telah Ditahankan di depan Tim Penguji  
Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Agustus 2022  
Waktu : 12:00 – 13:00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

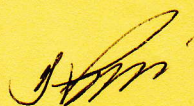
### TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I (Ketua) : Erna Kurniawati, SIP., M.Si  
Dosen Pembimbing II (Anggota) : Ratnawati, S.Sos., M.Si  
Dosen Penguji I (Anggota) : Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si  
Dosen Penguji II (Anggota) : Drs. Rudi Wibowo, M.Si



Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si

NIP. 196609172021211002

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan /penjiplakan/plagiasi, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Yang Menyatakan

**Ngafifatul Khanafi**  
**151180019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan rahmat-Nya penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Latar Belakang Korea Selatan dalam Menyepakati Kerjasama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dengan Jepang Tahun 2016”. Skripsi disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Segala usaha yang tercurah selama penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari semua pihak yang telah banyak membantu. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen wali yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi.
2. Ibu Erna Kurniawati, SIP., M.Si, selaku pembimbing 1 yang telah memberi waktu dan kesediaannya dalam membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis sejak awal proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
3. Ibu Ratnawati, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing 2 yang telah memberi waktu dan kesediaannya dalam membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis sejak awal proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si, selaku penguji 1 dalam ujian proposal dan sidang skripsi yang telah berkenan untuk mengoreksi serta menyempurnakan isi dari skripsi saya.
5. Bapak Drs. Rudi Wibowo, M.Si, selaku penguji 2 dalam sidang skripsi saya yang telah berkenan untuk membantu penyempurnaan penulisan ilmiah skripsi saya.
6. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta yang sudah mengajarkan ilmu bermanfaat selama penulis menempuh studi.
7. Keluarga serta teman-teman yang mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis, untuk itu

apabila terdapat kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini serta dapat memberi manfaat bagi penulis dan para pembaca.

**Yogyakarta, Agustus 2022**  
**Penyusun**

**Ngafifatul Khanafi**  
**NIM 151180019**

**LATAR BELAKANG KOREA SELATAN DALAM MENYEPAKATI  
KERJASAMA *GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION*  
*AGREEMENT* (GSOMIA) DENGAN JEPANG TAHUN 2016**

**Oleh : Ngafifatul Khanafi**

**Dibimbing oleh : Erna Kurniawati, SIP., M.Si dan Ratnawati, S.Sos. M.S.i**

**ABSTRAK**

Kerjasama General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) merupakan kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang. Pada mulanya kerjasama tersebut akan dilaksanakan pada era Presiden Lee Myung-bak, akan tetapi kerjasama tersebut gagal dilaksanakan karena adanya penolakan dari pihak domestik Korea Selatan. Pada tahun 2016, kerjasama tersebut kembali dibahas pada era Presiden Park Geun-hye. Pihak domestik Korea Selatan tidak menyetujui kerjasama tersebut, akan tetapi Presiden Park Geun-hye tetap menandatangani pada November 2016. Untuk mengetahui latar belakang Presiden Park Geun-hye menyetujui kerjasama tersebut, penelitian ini menggunakan teori Model Aktor Rasional oleh Graham T Allison, yakni terdapat tiga alasan : kemampuan militer Jepang, adanya dorongan dari Amerika Serikat serta terdapat peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

**Kata Kunci : GSOMIA, Kerjasama Militer, Korea Selatan, Jepang.**



**THE BACKGROUND OF SOUTH KOREA'S AGREEMENT IN GENERAL  
SECURITY OF MILITARY INFORMATION AGREEMENT (GSOMIA)  
WITH JAPAN IN 2016**

**By : Ngafifatul Khanafi**

**Supervised by : Erna Kurniawati, SIP., M.Si and Ratnawati, S.Sos. M.S.i**

**ABSTRACT**

*The General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) is a military cooperation between South Korea and Japan. Initially, the cooperation was to be carried out in the era of President Lee Myung-bak, but the cooperation failed to be implemented due to resistance from the South Korean domestic side. In 2016, the cooperation was discussed again during the era of President Park Geun-hye. The South Korean domestic side did not agree to the cooperation, but President Park Geun-hye signed it on November 2016. To find out the background of President Park Geun-hye agreeing to the cooperation, this study uses the theory of the Rational Actor Model by Graham T Allison, namely there are three reasons: Japan's military capabilities, the encouragement of the United States and there is an increase in North Korean nuclear and missile activities.*

***Keywords : GSOMIA, Military Cooperation, South Korea, Japan.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kerangka Berpikir .....	10
E. Hipotesis.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
H. Batasan Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II DINAMIKA HUBUNGAN KOREA SELATAN DAN JEPANG .....</b>	<b>17</b>
A. Hubungan Korea Selatan dan Jepang.....	17
B. Isu Sejarah Terkait dengan Jepang.....	23
C. Dorongan dari Amerika Serikat .....	27
D. Kerjasama <i>General Security of Military Information Agreement</i> (GSOMIA) ....	37
<b>BAB III FAKTOR KOREA SELATAN MENANDATANGANI KERJASAMA GSOMIA DENGAN JEPANG TAHUN 2016 .....</b>	<b>46</b>
A. Kemampuan Militer Jepang .....	46
B. Peningkatan Aktivitas Nuklir dan Rudal Korea Utara.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Publik Korea Selatan Menolak Kerjasama GSOMIA.....	9
Gambar 2.1.	Kuil Yasukuni.....	24
Gambar 2.2.	Pertemuan Pertama Presiden Park Geun Hye dengan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2014.....	32
Gambar 2.3.	Pertemuan Kedua Presiden Barack Obama, Presiden Park Geun Hye dan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2016.....	33
Gambar 2.4	Penandatanganan Kerjasama GSOMIA oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-ko dan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Yasumasa Nagamine.....	34
Gambar 3.1	Kapal Hayabusa.....	51
Gambar 3.2	Penyebaran Aegis Destroyer.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pertemuan Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.....	35
Tabel 2.2.	Garis Besar Perjanjian GSOMIA tahun 2016.....	38
Tabel 3.1.	Perbedaan NDPG 2010 dan NDPG 2014.....	48
Tabel 3.2.	Jumlah Aset Militer Jepang Tahun 2016.....	49
Tabel 3.3.	Anggaran Militer Jepang Tahun 2012-2016.....	53
Tabel 3.4.	Ancaman Korea Utara Tahun 2012-2016.....	60

## DAFTAR SINGKATAN

ACSA	: <i>Acquisition and Cross-Servicing Agreement</i>
BMD	: <i>Ballistic Missile Defense</i>
CMI	: <i>Classified Military Information</i>
EAI	: <i>East Asia Institute</i>
GSOMIA	: <i>General Security of Military Information Agreement</i>
JDA	: <i>Japan Defense Army</i>
MTDP	: <i>Mid-Term Defense Program</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NDPG	: <i>National Defense Program Guideline</i>
NSS	: <i>National Security Strategy</i>
USFK	: <i>United States Force Korea</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
THAAD	: <i>Terminal High Altitude Area Defense</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hubungan internasional, kesepakatan kerjasama merupakan salah satu langkah awal untuk mencapai sebuah kepentingan nasional suatu negara. Kesepakatan untuk menjalin kerjasama pada umumnya dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih. Sedangkan untuk cakupan isu kerjasama dapat meliputi sektor ekonomi, keamanan, militer dan lain sebagainya.

Korea Selatan dan Jepang menyepakati kerjasama *General Security of Military Information Agreement* ( GSOMIA ) yang merupakan kerjasama berbagi informasi rahasia di bidang keamanan. Kerjasama tersebut penting bagi kedua negara untuk mewujudkan keamanan di wilayah Asia Timur khususnya di wilayah Korea Selatan dan Jepang dari ancaman Korea Utara. Pada tahun 2012, kerjasama GSOMIA gagal ditandatangani karena adanya sentimen anti-Jepang yang kuat di tengah masyarakat Korea Selatan berkaitan dengan isu sejarah seperti isu *comfort women* dan sengketa pulau Dokdo. Selain itu, penolakan juga datang dari parlemen, sehingga pemerintah Korea Selatan membatalkan kesepakatan kerjasama GSOMIA. Akan tetapi, pada tahun 2016 Korea Selatan akhirnya menyepakati kerjasama GSOMIA dengan Jepang meskipun masih terjadi sentimen anti-Jepang serta penolakan dari pihak parlemen. Kesepakatan GSOMIA tetap dilaksanakan, hal ini dikarenakan pemerintah Korea Selatan tengah berupaya melindungi wilayahnya dari ancaman Korea Utara.

Perbedaan sikap yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012 dan tahun 2016 dalam menghadapi perjanjian GSOMIA memiliki luaran yang berbeda meskipun dengan kondisi yang sama yakni adanya respon negatif dari masalah domestik Korea Selatan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Latar belakang Korea Selatan Dalam Menyepakati Kerjasama GSOMIA dengan Jepang tahun 2016” penting dilakukan karena adanya perbedaan keputusan

yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan dalam menyikapi kerjasama GSOMIA pada tahun 2012 dan 2016.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Korea Selatan dan Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki hubungan yang rumit. Wilayah Korea Selatan dan Jepang terletak berdekatan secara geografis di kawasan Asia Timur. Selain itu, Korea Selatan dan Jepang juga memiliki beberapa nilai-nilai budaya yang sama yaitu kesamaan aksara atau penulisan dalam Korea Selatan yang disebut *Hanja* dan dalam Jepang disebut *Kanji*, budaya penggunaan sumpit ketika makan, hingga dasar berpikir dan moral. Akan tetapi kedekatan wilayah serta persamaan nilai-nilai budaya tidak membuat hubungan kedua negara tersebut dapat dikatakan harmonis. Dinamika hubungan kedua negara yang cenderung fluktuatif, disebabkan oleh adanya faktor sejarah pada masa silam yang terbawa hingga dewasa ini.

Fakta bahwa Jepang pernah menjajah Korea Selatan pada tahun 1910 hingga tahun 1945 membawa pengaruh buruk bagi hubungan politik Korea Selatan dan Jepang. Pada masa kelam tersebut, masyarakat Korea Selatan menyebutnya sebagai “*The Dark Days*” atas perlakuan kejam Jepang terhadap masyarakat Korea Selatan.<sup>1</sup> Kebijakan Jepang yang dinilai tidak adil seperti merampas tanah dan bahan pangan, pemerasan tenaga kerja, hingga salah satu kebijakan yang paling kontroversial yakni “*comfort women*” atau budak seks yang dipaksa untuk melayani tentara-tentara Jepang, membuat masyarakat Korea Selatan tersiksa dan membawa luka mendalam bukan hanya bagi para korban semata, melainkan bagi mayoritas masyarakat Korea Selatan.<sup>2</sup>

Isu-Isu sejarah terkait dengan Jepang menjadi sensitif bagi masyarakat Korea Selatan. Seperti halnya pada isu *comfort women*, isu tersebut mencapai puncak kekecewaan masyarakat Korea Selatan yang terjadi pada peringatan ke-1000<sup>th</sup> dalam aksi *Wednesday Demonstration*. Para demonstran melakukan

---

<sup>1</sup>Yang Seung-Yoon & Nur Aini Setiawati. 2003. *Sejarah Korea Selatan Sejak Awal Berdiri Hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta: Gajah Mada Univ Press. Hal. 135.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal 136.

peletakan *Statue of Peace* atau *Pyonghwa-bi* dalam bahasa Korea, yakni patung berupa seorang gadis sebagai simbol korban *comfort women* yang diletakan di depan gedung Kedutaan Besar Jepang di Kota Seoul.<sup>3</sup> Aksi tersebut dilakukan atas dasar kekecewaan masyarakat Korea Selatan karena sikap inkonsistensi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Jepang dalam menghadapi isu *comfort women* sejak demonstrasi pertama kali muncul di publik pada tahun 1992.<sup>4</sup>

Perlakuan Jepang di masa lalu membuat publik Korea Selatan merasa marah dan kecewa, terlebih perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan tidak hanya sekali. Isu perebutan sengketa pulau Dokdo juga menjadi salah satu isu besar yang dibicarakan masyarakat Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan masing-masing memiliki klaim tersendiri terhadap Pulau Dokdo berdasarkan konektivitas geografis dan bukti dokumentasi sejarah.<sup>5</sup> Munculnya isu Pulau Dokdo atau yang disebut Pulau Takeshima bagi Jepang juga disebabkan oleh faktor historikal diklaim milik Jepang dengan bukti Perjanjian *San Fransisco* tahun 1951 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea, melepaskan seluruh hak, kepemilikan dan klaimnya atas Korea, termasuk Pulau *Quelpart*, *Port Hamilton* dan *Dagelet*.<sup>6</sup> Dari bukti perjanjian tersebut diartikan oleh Jepang jika hanya Pulau *Quelpart*, *Port Hamilton* dan *Daegelet* yang dilepaskan, sedangkan Pulau Takeshima (Dokdo) tidak termasuk bagian pulau yang dimaksud. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat Korea Selatan merasa geram, karena bagi Korea Selatan, Pulau Dokdo ialah bagian dari wilayahnya.

Akibat dari isu-isu sejarah yang kian berkembang di tengah masyarakat Korea Selatan, sehingga muncul istilah sentimen anti-Jepang. Sentimen anti-Jepang menggambarkan perspektif buruk masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang.

---

<sup>3</sup>Choe Sang Hun. 2015. "Statues Placed in South Korea Honor 'Comfort Women' Enslaved for Japan Troops". Diakses melalui [https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/asia/south-korea-statues-honor-wartime-comfort-women-japan.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/asia/south-korea-statues-honor-wartime-comfort-women-japan.html?_r=0) pada 24 November 2021.

<sup>4</sup>Emma Stubblafeld. 2018. "The Wednesday Protests : Comfort Women and Their Fight for Recoqnition". Diakses melalui <https://www.carolinapoliticalreview.org/editorial-content/2018/10/24/the-wednesday-protests-comfort-women> pada 25 November 2021.

<sup>5</sup>Utami Gita Syafitri dkk. 2013. "Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan". *Journal of USU International Law*,. Vol.1, No.2, 2013. Hal. 3.

<sup>6</sup>Ministry of Foreign Affairs of Japan . 2020. "Fact Sheet : Position Japan of Takeshima". Diakses melalui <https://www.us.embjapan.go.jp/english/html/Position%20of%20Japan%20on%20Takeshima.pdf#:~:text=In%20January%201905%2C%20the%20Japanese%20government%20made%20a,Takeshima%20as%20a%20bo mbing%20range%20for%20US%20Forces> pada 1 Desember 2021.



Perspektif negatif masyarakat Korea Selatan terhadap isu sejarah menempati posisi tertinggi dalam survey yang dilakukan oleh *The Genron NPO* dan *East Asia Institute* (EAI) sebagai lembaga survey di kawasan Asia Timur. Survey tersebut dilakukan untuk melihat impresi Korea Selatan terhadap Jepang. Data menunjukkan sejumlah 77% masyarakat Korea Selatan menganggap negatif Jepang karena Jepang dianggap tidak memberikan permintaan maaf yang tulus terkait isu sejarah seperti isu *comfort women*. Sedangkan pada isu sengketa Pulau Dokdo 84,4%. Serta pada isu diskriminasi sejumlah 8,20%.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa isu sejarah merupakan faktor utama pandangan negatif masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang.

Terlepas dari buruknya hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang. Korea Selatan dan Jepang memiliki satu ancaman yang sama yakni dari Korea Utara. Korea Utara yang gencar melakukan provokasi untuk mengembangkan nuklir mengancam Korea Selatan sebagai negara yang secara langsung berkonflik dengan Korea Utara. Korea Utara dianggap menjadi ancaman kemanana yang paling mengkhawatirkan di kawasan Asia Timur karena adanya peluang terjadinya perang nuklir.<sup>8</sup> Ancaman Korea Utara semakin meningkat diawali pada tahun 2010, Korea Utara melakukan penembakan terhadap kapal perang *Cheonan* milik Korea Selatan yang menyebabkan tewasnya seluruh awak kapal.<sup>9</sup> Hingga tahun 2016, Korea Utara masih melakukan provokasi yang membuat negara-negara tetangga meningkatkan kewaspadaannya termasuk Jepang untuk melindungi wilayahnya. Baik Korea Selatan maupun Jepang melihat adanya urgensi keamanan di kawasan Semenanjung Korea yang sangat penting karena menyangkut keamanan negara. Dengan adanya urgensi keamanan ini membuat Korea Selatan dan Jepang membuka peluang untuk melakukan kerjasama militer.

Pembahasan mengenai kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang menghasilkan kesepakatan *General Security of Military Information Agreement*

---

<sup>7</sup>Genron NPO. 2013. "The 1<sup>st</sup> Japan & South Korea Joint Opinion Poll". Diakses melalui [https://www.genron-npo.net/en/opinion\\_polls/archives/5263.html](https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5263.html) pada 1 Desember 2021.

<sup>8</sup>M Najeri Al Syahrin. 2018. *Keamanan Asia Timur : Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Yogyakarta : Komojoyo Press. Hal.26.

<sup>9</sup>Victor Cha. 2010. "The Sinking of the Cheonan". Diakses melalui <https://www.csis.org/analysis/sinking-cheonan> pada 17 Februari 2022

(GSOMIA). GSOMIA merupakan kerjasama militer yang bertujuan untuk saling memberikan informasi intelijen yang bersifat rahasia. Informasi rahasia yang didapatkan oleh Korea Selatan dari Jepang maupun sebaliknya, digunakan untuk meminimalisir ancaman dari Korea Utara. GSOMIA secara spesifik merupakan sebuah perjanjian militer dengan metode berbagi informasi penting dapat berupa teknologi, strategi, kode *cryptographic*, atau sistem *code-deciphering*.<sup>10</sup> Dalam penerapan kerjasama intelijen, GSOMIA termasuk dalam kerjasama intelijen dengan penyebaran informasinya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kedua negara.<sup>11</sup>

Kesepakatan GSOMIA seharusnya ditandatangani pada tahun 2012, namun gagal dilaksanakan karena adanya sentimen anti-Jepang yang kuat di tengah masyarakat Korea Selatan. Kelompok masyarakat penolak GSOMIA dapat digolongkan menjadi dua yakni golongan konservatif dan liberal, kelompok konservatif berasal dari para solidaritas *comfort women* yang tidak menyetujui pemerintah Korea Selatan melakukan kerjasama GSOMIA dengan Jepang dengan alasan sejarah terkait masalah *comfort women* yang belum terselesaikan dengan baik oleh Jepang.<sup>12</sup> Sedangkan, kelompok liberal ialah kelompok generasi muda yang menolak kerjasama GSOMIA karena adanya ketidakpercayaan kelompok liberal terhadap pemerintah.<sup>13</sup> Disamping itu, kelompok masyarakat ini menolak kesepakatan GSOMIA juga disebabkan oleh pemerintah Korea Selatan yang cenderung tidak memperhatikan konsensus publik ketika membuat sebuah kebijakan. Bagi masyarakat Korea Selatan pemerintah seringkali membuat kebijakan kontroversial, seperti kebijakan impor daging sapi dari Amerika dan perjanjian bebas dagang dengan Amerika yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Moon Young Jun. 2012. "History Intrudes on Korea-Japan Security Cooperation". Diakses melalui <https://www.stimson.org/2012/history-intrudes-korea-japan-security-cooperation/> pada 14 Februari 2022.

<sup>11</sup> Report GSOMIA. 2016. "General Security of Military Information Agreement". Diakses pada 8 Desember 2021.

<sup>12</sup> Seongho Sheen dan Jina Kim. 2012. "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact". Diakses melalui <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb176.pdf?file=1&type=node&id=33602> pada 17 Februari 2022.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal.2.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal.2.

Selain itu, penolakan juga datang dari parlemen Korea Selatan yang menganggap tidak dilibatkan dalam kesepakatan GSOMIA, sehingga hal tersebut terkesan dirahasiakan.<sup>15</sup> Parlemen juga menyebutkan bahwa Presiden Lee Myung Bak yang pada tahun tersebut menjabat, tidak mengikuti prosedur dengan memperhatikan arahan dari Majelis Nasional Korea.<sup>16</sup> Atas desakan dari masyarakat Korea Selatan dan parlemen yang tidak menyetujui perjanjian GSOMIA menyebabkan perjanjian tersebut gagal ditandatangani satu jam sebelum resmi disepakati.

Ketidakpercayaan publik setelah permasalahan kerjasama GSOMIA menyebabkan kepemimpinan Lee Myung Bak mendapatkan tingkat dukungan masyarakat terhadap presiden rendah, yakni 26,1% dalam empat bulan terakhir.<sup>17</sup> Hal tersebut membuat Lee Myung Bak berusaha untuk memperbaiki hubungan domestik dengan merubah arah kebijakan yang sebelumnya pro Jepang menjadi sebaliknya dengan tujuan mendapatkan kembali simpati dari masyarakat Korea Selatan.<sup>18</sup>

Sebagai bentuk upaya Presiden Lee mendapat simpati dari masyarakat Korea Selatan, Presiden Lee kemudian mengunjungi Pulau Dokdo yang merupakan pulau sengketa dengan Jepang. Namun, tindakan tersebut menyebabkan hubungan politik Korea-Selatan dan Jepang semakin memburuk. Selain itu, Presiden Lee juga kerap memberikan pernyataan-pernyataan yang menyinggung Pemerintah Jepang, seperti berkomentar mengenai pengaruh Jepang yang menurun dalam komunitas internasional. Hal tersebut membuat Pemerintah Jepang kecewa dan membuat hubungan politik kedua negara mencapai titik terendah hingga akhir kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak di tahun 2013.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Shin-H. 2012. "Seoul Under Fire for Tokyo Military Pact". Diakses melalui <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120628001308> pada 5 Januari 2022.

<sup>16</sup> Seongho Sheen dan Jina Kim, *Loc. Cit.* Hal.2.

<sup>17</sup> Moon Young Jun, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Chung In-Moon & Won Young Hur. 2017. "A South Korean Perspective : Trilateral Co-operation : the Devil's in Domestic Politic". Diakses melalui <https://www.globalasia.org/v12no1/cover/a-south-korean-perspective-trilateral-co-operation-the-devils-in-domestic-politics-chung-in-moon-won-young-hur> pada 16 April 2022.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Presiden Park Geun Hye sebagai pengganti kepemimpinan Presiden Lee yang kontroversial terhadap Jepang ternyata tidak merubah keadaan. Hubungan Korea Selatan dan Jepang belum membuahkan hasil yang maksimal, bahkan Presiden Park bertindak keras terhadap Jepang. Namun sikap keras yang ditunjukkan oleh Presiden Park dianggap sebagai permainan politik semata. Hal ini dilakukan karena Presiden Lee juga ingin meningkatkan popularitasnya terhadap masyarakat Korea Selatan.<sup>20</sup> Ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang mulai membaik pada tahun 2015 karena adanya dorongan dari Amerika Serikat untuk segera memulihkan hubungan. Atas dasar inilah, Pemerintah Korea Selatan dan Jepang mulai melakukan upaya perbaikan hubungan politik dengan menyelesaikan isu *comfort women* serta membahas ulang kerjasama GSOMIA yang sebelumnya gagal dilaksanakan di tahun 2012.

Selama kurun waktu empat tahun, pembahasan mengenai pakta GSOMIA baru kembali dibuka pada era Park Geun Hye. Pada pembahasan putaran dialog pertama dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 1 November 2016.<sup>21</sup> Pada tahap ini tidak memerlukan waktu yang lama, karena pembahasan mengenai *general content* sudah pernah dibahas dan disepakati pada tahun 2012. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Korea Selatan yang menyatakan bahwa diskusi dilakukan untuk membahas isi umum berdasarkan teks perjanjian yang disepakati sementara pada tahun 2012.<sup>22</sup> Tahap kedua putaran dialog *working level* dilaksanakan pada tanggal 9 November 2016. Pada tahap ini juga terjadi kesepakatan pada hampir seluruh bidang yang telah didiskusikan. Pemerintah Korea Selatan juga menyatakan telah memeriksa rancangan dengan seksama, sehingga perjanjian disepakati.<sup>23</sup> Kemudian pada tanggal 23 November 2016, kerjasama GSOMIA akhirnya resmi disepakati oleh Korea Selatan. Pakta GSOMIA disetujui oleh Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye pada saat rapat kabinet yang dilaksanakan pada tanggal 22

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Gil Yun-Hyung. 2016. "South Korea and Japan First Hold Round of Talks on Military Info Sharing Agreement". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/768470.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/768470.html) pada 17 Februari 2022.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Park Byong-Su. 2016. "Seoul and Tokyo Agree on Major Terms Military Information Agreement". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/769710.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/769710.html) pada 17 Februari 2022.

November 2016. Kemudian kesepakatan resmi kerjasama GSOMIA akhirnya dilakukan sehari setelahnya di Seoul oleh Menteri Pertahanan Han Min-Koo dan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan, Yasumasa Nagamine.<sup>24</sup>

Isi dari perjanjian GSOMIA pada tahun 2016 merujuk pada perjanjian GSOMIA pada tahun 2012, sehingga tidak mengalami perubahan secara signifikan. Baik Korea Selatan dan Jepang menganggap perjanjian ini penting dan telah sepakat untuk menandatangani kerjasama GSOMIA karena mengingat adanya ancaman dari Korea Utara. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida bahwa :

*“Cooperation between Japan and South Korea is becoming more important than ever in the security sphere as North Korea’s nuclear (development) and missiles pose a different level of threat from before”.*<sup>25</sup>

(Kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan menjadi lebih penting dari sebelumnya di bidang keamanan karena pengembangan nuklir dan misil Korea Utara yang menimbulkan tingkat ancaman yang berbeda dari sebelumnya).

Namun demikian, keberhasilan Presiden Park Geun Hye dalam mewujudkan kesepakatan GSOMIA sebagai inisiatif perubahan kebijakan luar negeri sebelumnya, mendapatkan respon negatif dari lingkup domestik Korea Selatan. Respon negatif datang dari masyarakat Korea Selatan khususnya para solidaritas aksi *comfort women* karena *Comfort Women Agreement* yang merupakan bentuk rekonsiliasi Jepang terhadap penyintas *comfort women* belum dikatakan usai. Adanya ketidakpuasan solidaritas *comfort women* dikarenakan Jepang belum meminta maaf secara tulus kepada para korban.<sup>26</sup> Respon negatif juga semakin meningkat karena adanya skandal yang tengah dihadapi Park Geun Hye terkait korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan bersama Choi Soon Sil yang merupakan sahabat dekat Park Geun Hye.<sup>27</sup> Selain itu, pihak parlemen juga

---

<sup>24</sup> Ju-min Park. 2016. “South Korea, Japan Agree Intelligence-Sharing on North Korea Threat”. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-military-idUSKBN13I068> pada 5 Februari 2022.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 1.

<sup>26</sup> Kumagai, Naoko. 2020. “South Korea and Japan: Resolving the Comfort Women Issue”. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2020/09/south-korea-and-japan-resolving-the-comfort-women-issue/> pada 5 Januari 2022.

<sup>27</sup> BBC. 2018. “South Korea’s Presidential Scandal”. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-37971085> pada 17 Februari 2022.

menganggap kesepakatan GSOMIA terlalu cepat untuk disepakati terlebih Park Geun Hye sedang dalam skandal dan dianggap tidak sepatasnya membuat sebuah kebijakan.<sup>28</sup>

Gambar 1.1.

### Publik Korea Selatan Menolak Kerjasama GSOMIA



Sumber : NY Times. 2016. “South Korean Leader, Amid Scandal, Approves Intelligence Pact with Japan”. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2016/11/22/world/asia/south-korea-intelligence-sharing-japan.html> pada 14 Agustus 2022.

Dari survey yang dilakukan untuk menilai perspektif masyarakat Korea Selatan terhadap GSOMIA. Survei tersebut dilakukan pada masyarakat dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Sejumlah 59% dengan rentang usia 20-40 tahun masyarakat Korea Selatan tidak setuju dengan perjanjian GSOMIA dan sisanya memilih yang lain yakni, 31% menyetujui perjanjian GSOMIA, serta 10% memilih untuk tidak merespon.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan perjanjian GSOMIA tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari domestik Korea Selatan baik dari solidaritas *comfort women* maupun golongan muda. Perbedaan kebijakan yang diambil terhadap kesepakatan GSOMIA pada tahun 2012 dengan tahun 2016, menunjukkan adanya pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan sebuah kebijakan luar

<sup>28</sup> Jung In-Hwan. 2016. “Despite Criticism, South Korea Sign GSOMIA with Japan”. Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/771627.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/771627.html) pada 17 Februari 2022.

<sup>29</sup> Gallup Report. 2016. “Daily Opinion No.236 Korea-Japan Military Cooperation”. Diakses melalui <http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=789> pada 6 Februari 2022.

negeri meskipun dalam kondisi yang sama yakni adanya respon negatif dari domestik Korea Selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya muncul rumusan masalah: Mengapa Korea Selatan akhirnya menyetujui perjanjian GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2016 ?

### **D. Kerangka Berpikir**

Perkembangan dunia internasional serta meningkatnya intensitas kebutuhan sebuah negara melahirkan berbagai kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor negara. Kesepakatan kerjasama dilakukan melalui perjanjian internasional sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing negara. Perjanjian baik bersifat regional maupun internasional memiliki beberapa bidang seperti keamanan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Wayan Prahitna, perjanjian internasional didefinisikan sebagai kesepakatan dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu permasalahan yang ditujukan untuk melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.<sup>30</sup>

Pada dasarnya negara menyetujui suatu perjanjian internasional karena ingin mencapai suatu kepentingan. Ketika perjanjian internasional dapat memenuhi sebagian atau seluruh dari kepentingan suatu negara, maka negara akan menyetujui perjanjian. Dibalik kesepakatan sebuah perjanjian internasional terdapat proses yang dilakukan oleh negara untuk mempertimbangkan untung-rugi sebuah perjanjian. Melalui teori model aktor rasional dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu negara dalam mempertimbangkan kesepakatan kerjasama. Menurut *Cooper* dan *Schindler* teori merupakan seperangkat konsep

---

<sup>30</sup> Ekram Pawiroputro. "Hukum Internasional Umum". Diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4310-M1.pdf> pada 5 Februari 2022.

yang saling terkait satu sama lain secara sistematis, definisi, posisi yang dilakukan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta.<sup>31</sup>

### **Model Aktor Rasional**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka akan digunakan kerangka berpikir *Model Rational Actor* oleh Graham T Allison yang digunakan untuk menganalisis keputusan yang diambil oleh suatu negara dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri. Menurut Graham T Allison, Model Aktor Rasional diartikan sebagai seorang aktor yang berupaya membuat sebuah kebijakan yang dianggap paling rasional dengan memperhitungkan tujuan dan kalkulasi pemerintah.<sup>32</sup> Dalam model Aktor Rasional terdapat empat inti, yakni *Goals/Objectives, Alternatives, Consequences* dan *Choice*.<sup>33</sup>

*Goals / Objectives* diartikan sebagai kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara dari serangkaian konsekuensi jika diambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, Korea Selatan mengambil sebuah keputusan luar negeri karena adanya kepentingan nasional yang sekaligus diikuti konsekuensinya. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah berkaitan dengan keamanan wilayah Korea Selatan untuk meminimalkan ancaman dari Korea Utara.

Sedangkan *Alternatives* diartikan seorang aktor rasional akan memilih serangkaian pilihan keputusan dalam situasi tertentu. Alternatif keputusan lain yang dapat diambil oleh Korea Selatan yakni dapat menunda kerjasama GSOMIA hingga permasalahan yang ditimbulkan oleh isu sejarah maupun skandal Park Geun Hye diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga Korea Selatan sebagai negara demokratis dapat dianggap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan menerima opini atau aspirasi dari publik. Disisi lain, Korea Selatan juga telah banyak bekerjasama di bidang intelijen militer dengan 33 negara lainnya serta satu organisasi

---

<sup>31</sup> Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Ilmu. Hal.32.

<sup>32</sup> Asep Setiawam dan Endang Sulastri. 2017. *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ PRESS. Hal.57.

<sup>33</sup>*Ibid.* Hal 57.



internasional yakni NATO.<sup>34</sup> Berdasarkan beberapa rangkaian keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan memilih keputusan untuk melanjutkan dan menandatangani kesepakatan GSOMIA dengan Jepang dalam situasi masyarakat Korea Selatan tidak mendukung perjanjian tersebut.

*Consequences* adalah akibat dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor rasional. Aktor rasional menyadari adanya akibat dari pilihan keputusan yang diambil, sehingga aktor rasional akan mempertimbangkan keputusan yang dianggap rasional. Pemerintah Korea Selatan sebagai aktor rasional yang mengambil sebuah keputusan telah mempertimbangkan konsekuensinya dengan melihat keuntungan atau kepentingan dalam sebuah kesepakatan GSOMIA dengan Jepang.

*Choice* diartikan sebagai serangkaian keputusan rasional yang konsekuensi positifnya mendapatkan peringkat tertinggi diantara keputusan rasional lainnya. Dalam hal ini, Korea Selatan menghadapi beberapa keputusan yang akan diambil. Pertimbangan pertama Korea Selatan dalam menyepakati kesepakatan GSOMIA dititikberatkan pada keamanan wilayah Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Percobaan rudal balistik dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 membuat kondisi keamanan Korea Selatan terancam dari Korea Utara.<sup>35</sup> Adanya peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara semakin tinggi, hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi Korea Selatan sebab keamanan wilayahnya terancam akibat agresivitas Korea Utara, sehingga faktor tersebut menyebabkan Korea Selatan menyepakati kerjasama GSOMIA dengan Jepang. Disisi lain, Jepang telah memiliki teknologi yang canggih seperti satelit pengintai, sistem radar, dan pesawat peringatan dini untuk mendeteksi rudal balistik Korea Utara.<sup>36</sup> Dengan keunggulan

---

<sup>34</sup> Sangbo Park. 2016. "Implications of General Security of Military Information Agreement for South Korea". Diakses melalui <https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/> pada 5 Februari 2022.

<sup>35</sup> Olinda L Laimheheriwa. 2015. "Analisis Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)". *Jurnal Korean War Kajian Strategis dan Studi Keamanan*. Hal. 9.

<sup>36</sup> Konstantin Atmolv. 2019. "A Tense Time for Relations Between Japan and South Korea : The GSOMIA and Moon's Relations with USA". Diakses melalui <https://journalneo.org/2019/09/12/a-tense-time-for-relations-between-japan-and-south-korea-the-gsomia-and-moon-s-relations-with-the-usa/> pada 5 Februari 2022.

teknologi Jepang, informasi intelijen dari Jepang diperlukan bagi Korea Selatan untuk menambah kekuatan militer Korea Selatan.

Selain itu, dorongan dari Amerika Serikat untuk menyepakati kerjasama GSOMIA akan menguatkan hubungan trilateral antara Amerika-Korea Selatan dan Jepang.<sup>37</sup> Selain itu dengan adanya dorongan dari Amerika Serikat, militer Korea Selatan semakin kuat karena adanya bantuan dana militer dan pelatihan militer.<sup>38</sup> Hal ini menjadi pertimbangan Korea Selatan, karena tidak hanya memperkuat bidang keamanan, tetapi juga meliputi bidang lainnya seperti ekonomi dan politik. Keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan dengan nilai maksimal di antara kondisi yang sulit bagi Korea Selatan.

Dengan adanya keputusan tersebut, Korea Selatan juga telah menyampingkan konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari permasalahan domestik Korea Selatan. Selain itu, mengingat kerjasama GSOMIA juga akan menguatkan hubungan trilateral Amerika Serikat-Korea Selatan dan Jepang, hal tersebut dapat dipersepsikan negatif oleh China-Korea Utara dan Rusia sebagai bentuk ancaman baru bagi negara-negara tersebut.<sup>39</sup>

## **E. Hipotesis**

Untuk melihat latar belakang Korea Selatan menandatangani kerjasama GSOMIA dengan Jepang tahun 2016, digunakan teori Model Aktor Rasional. Berdasarkan teori tersebut, seorang aktor rasional akan membuat kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi untung dan rugi. Dalam hal ini Presiden Park memiliki pilihan untuk menyepakati kerjasama GSOMIA atau menunda kerjasama GSOMIA. Dengan menyepakati GSOMIA keuntungan Korea Selatan akan mendapatkan informasi intelijen dari Jepang secara efektif dan akurat, sehingga Korea Selatan dapat mengetahui aktivitas Korea Utara. Akan tetapi, dalam sisi negatif Pemerintah Korea Selatan tidak didukung oleh parlemen dan publik Korea Selatan, hal ini

---

<sup>37</sup> Jae-Joe Park. "Cost-Benefit Analysis of the South Korea and Japan General Security of Military Information Agreement". *Korean Institute for National Unification*. Hal.2.

<sup>38</sup> Congressional Research Service (CSR). 2021. "South Korea : Background and US Relation". Diakses melalui <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10165.pdf> pada 16 April 2022.

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal 4.

memicu mosi yang dapat dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan. Selain itu, dalam survei yang dilakukan untuk menilai dukungan terhadap Presiden akan rendah sebab pihak domestik tidak menyetujui GSOMIA. Sedangkan jika Presiden Park Geun-hye menolak kerjasama GSOMIA, keuntungan yang akan didapatkan Korea Selatan akan didukung oleh parlemen dan publik, tetapi kerugiannya yakni tidak mendapatkan informasi intelijen dari Jepang untuk melihat pergerakan Korea Utara. Bentuk dukungan tersebut secara tidak langsung akan terjadi harmonisasi hubungan antara pemerintah dan parlemen Korea Selatan maupun masyarakat Korea Selatan. Berdasarkan kalkulasi untung dan rugi tersebut, Presiden Park akhirnya memilih untuk menyetujui kerjasama GSOMIA dengan Jepang disebabkan karena kemampuan kapabilitas militer Jepang, serta meningkatnya aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif disebut juga metode baru karena popularitasnya dinilai masih baru. Pada awalnya metode penelitian ini lebih banyak digunakan pada ilmu antropologi budaya (etnographi). Namun dalam perkembangannya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia.<sup>40</sup>

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Pustaka. Pada teknik pengumpulan data dalam Studi Pustaka merupakan pengumpulan informasi dan data penelitian melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data yang akan diolah bersumber dari data sekunder, yakni data - data tidak langsung untuk mendukung penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka seperti buku, jurnal, dokumen, report dan lainnya.

---

<sup>40</sup> Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hal. 8.

## **2. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan situasi relevan atas fakta dan data untuk dihubungkan antar variabel, lalu diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

### **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Korea Selatan dalam menyepakati kesepakatan GSOMIA dengan Jepang tahun 2016. Adapun untuk manfaat penelitian terdiri dari dua manfaat, yakni manfaat secara akademisi dan secara praktis :

1. Manfaat akademis : peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi hubungan internasional terutama mengenai kerjasama militer, khususnya Korea Selatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi dan sumber sebagai acuan serta pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Kesepakatan GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang.
2. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terhadap peneliti sekaligus pembaca mengenai latar belakang Korea Selatan dalam menyepakati kesepakatan GSOMIA dengan Jepang.

### **H. Batasan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka batasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2012 hingga tahun 2016. Tahun 2012 ialah ketika perjanjian GSOMIA gagal ditandatangani oleh Korea Selatan. Sedangkan tahun 2016 ialah ketika perjanjian GSOMIA disepakati oleh Korea Selatan dan Jepang.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi empat bab. Pembahasan setiap

bab akan berhubungan satu sama lain dengan bab lainnya, sehingga membentuk karya tulis yang sistematis. Adapun sistematika penulisannya akan dituangkan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas alasan pemilihan judul, latar belakang, kerangka pemikiran, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II akan membahas mengenai dinamika hubungan politik Korea Selatan dan Jepang serta pembahasan mengenai GSOMIA.

Bab III berisi penjelasan mengenai faktor pemerintah Korea Selatan menyepakati perjanjian GSOMIA yakni karena kemampuan militer Jepang, adanya dorongan dari Amerika Serikat serta meningkatnya aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian

## **BAB II**

### **DINAMIKA HUBUNGAN KOREA SELATAN DAN JEPANG**

Pada bab 2, penulis akan membahas terkait dengan dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang dengan empat sub-bab yakni hubungan Korea Selatan dan Jepang, isu sejarah terkait dengan Jepang, dorongan Amerika Serikat, kerjasama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA), hingga terjadinya pengambilan keputusan menyepakati kerjasama GSOMIA di bab selanjutnya.

#### **A. Hubungan Korea Selatan dan Jepang**

Pasca penjajahan Korea Selatan oleh Jepang, hubungan kedua negara sering mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang menyebabkan hubungan tersebut ialah perbedaan pandangan para pemimpin di setiap era. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran hubungan Korea Selatan dan Jepang khususnya dalam membangun keamanan kedua negara. Kemajuan hubungan Korea Selatan dan Jepang secara signifikan dalam mencapai upaya keamanan bersama dapat dilihat pada era Presiden Park Chung-hee, Roh Tae-woo, Kim Dae-jung. Sedangkan kemunduran hubungan terlihat pada era Presiden Kim Young Sam serta Roh Moo-Hyun.<sup>1</sup>

Sejak berakhirnya *Korean War* pada tahun 1953, Korea Selatan dihadapkan pada persoalan ekonomi yang menurun tajam hingga menyebabkan krisis yang panjang. Hal ini berlangsung hingga era kepemimpinan Presiden Park Chung-hee pada tahun 1963 hingga 1979. Adanya kondisi tersebut membuat Presiden Park Chung-hee memiliki misi untuk membangkitkan perekonomian Korea Selatan melalui strategi *Fatherland Modernization*. Dalam strategi tersebut, Presiden Park melakukan perubahan melalui tiga tahap, yang pertama yakni dengan membangun

---

<sup>1</sup> Park Young June. 2016. "South Korea Diplomacy and The Evolution of Korea-Japan Security Relations 1965-2015" *Seoul Journal of Japanese Studies* Vol.2 , No.1. 2016. Hal.1

pondasi industri ekonomi, kedua melalui industrialisasi, lalu yang terakhir melalui produksi dan konsumsi massal.<sup>2</sup>

Ditengah upaya membangkitkan perekonomian Korea Selatan, Presiden Park juga berupaya membangun hubungan yang solid dengan negara lain, khususnya dengan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari normalisasi hubungan yang berhasil terwujud dalam *Treaty on Basic Relation* tahun 1965.<sup>3</sup> Kesepakatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kepentingan bersama serta memelihara keamanan internasional. Dengan adanya normalisasi tersebut, hubungan Korea Selatan dan Jepang semakin erat, sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan perekonomian dan keamanan kedua negara.

Dalam meningkatkan keamanan Korea Selatan, Presiden Park juga melakukan pertemuan tahunan di level kementerian untuk membahas mengenai arah kerjasama keamanan kedepannya serta bertukar pandang terkait posisi dan ancaman dari Korea Utara.<sup>4</sup> Selain itu, dalam tahap ini, Korea Selatan dan Jepang juga saling melakukan kunjungan ke basis militer masing-masing negara untuk melakukan latihan militer yang dipimpin oleh Amerika serta memperluas cakupan kerjasama keamanan yang dilakukan kedua negara.<sup>5</sup>

Gaya kepemimpinan Presiden Park Chung-hee yang fleksibel dan cenderung berorientasi pada masa depan membuat kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan GNP Korea Selatan secara signifikan dari \$87 ke \$1,242 hingga menyaingi perekonomian Korea Utara yang sebelumnya tertinggal.<sup>6</sup> Selain itu, arah kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang juga mengalami peningkatan dilihat dari kerjasama militer yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan pada era Park Chung-hee dinamika hubungan kedua negara cenderung stabil.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal.3

<sup>3</sup> Jinyul Ju. 2020. "Treaty on Basic 1965 Relations Between Japan and the Republic of Korea". Diakses melalui <https://thediplomat.com/tag/1965-treaty-on-basic-relations-between-japan-and-the-republic-of-korea/> pada 15 Mei 2022.

<sup>4</sup> Park Young June. *Op.cit* hal.7.

<sup>5</sup> *Op.cit* hal.7.

<sup>6</sup> Fuji Kamiya. 2018. "The Korean Peninsula After Park Chung Hee". *Japanese Perspectives on International Developments*, Vol. 20, No.27. Hal.2

Memasuki era Presiden Roh Tae-woo pada tahun 1988, Presiden Roh menentukan kebijakan Korea Selatan untuk berfokus pada unilateral Korea yang diimplementasikan melalui *Korean National Community Unification Policy* dan *Nord Politic*.<sup>7</sup> Dalam kebijakannya, Presiden Roh menyatakan visinya melalui kebijakan agar negara-negara aliansi Korea Selatan seperti Amerika dan Jepang untuk meningkatkan hubungannya dengan Korea Utara, disaat Korea Selatan juga membangun normalisasi hubungan dengan Korea Utara. Hal ini ditujukan sebagai upaya rekonsiliasi dari persoalan di Semenanjung Korea.

Disisi lain, dalam menghadapi Jepang, Presiden Roh menyatakan secara spesifik kebijakan luar negeri yang akan diambil melalui diplomasi yang aktif dan seimbang. Selain itu, Presiden Roh juga menempatkan kerjasama dengan Jepang sebagai tugas penting bagi Korea Selatan khususnya untuk membantu upaya rekonsiliasi dengan Korea Utara. Namun, Presiden Roh juga memahami masalah yang timbul akibat sejarah dapat menghambat hubungan kedua negara. Oleh karena itu, dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Miyazawa, Presiden Roh meminta agar pemerintah Jepang melakukan investigasi secara aktif terkait isu-isu sejarah serta mengambil langkah terukur untuk menghadapi situasi tersebut. Selain itu, dalam menjalin kerjasama keamanan dengan Jepang, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Lee Jong-ku menyatakan bahwa kerjasama keamanan dengan Jepang perlu diperbaiki untuk menentukan langkah-langkah kerjasama keamanan selanjutnya serta mengembangkan kerangka keamanan regional.<sup>8</sup>

Hubungan Korea Selatan dan Jepang cenderung stabil pada akhir era Presiden Roh Tae-Woo tahun 1992 disebabkan kedua negara masih memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya keamanan bagi wilayah kedua negara. Hal ini ditandai dengan adanya kunjungan kepala staf militer, Kim Jin Young bersama direktur umum *Japan Defense Army* (JDA) untuk membahas mengenai pertukaran personil dan informasi militer yang lebih luas. Di tahun 1993, kunjungan kembali dilakukan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan, yakni Lee Byung-tae dengan maksud untuk bertukar pandang mengenai nuklir Korea Utara. Kedua negara

---

<sup>7</sup>*Ibid.* Hal.8.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 11.



menyetujui akan adanya rencana operasi militer untuk meminimalisir provokasi Korea Utara. Selain itu, pada kunjungan tersebut juga menghasilkan *working-level meeting* yang akan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan bersama Menteri Pertahanan Jepang secara reguler untuk membahas mengenai pertahanan kedua negara.<sup>9</sup> Adanya kerjasama militer yang dijalin oleh kedua negara secara intensif menandakan hubungan Korea Selatan dan Jepang pada era Roh Tae-wo dalam kondisi stabil. Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Roh Tae-wo yang menempatkan Jepang sebagai mitra strategisnya, sehingga pada era tersebut kedua negara dapat mewujudkan kerjasama di bidang militer.

Pada era kepemimpinan Presiden Kim Young Sam, hubungan Korea Selatan dan Jepang cenderung pasang surut. Hal ini disebabkan oleh kebijakan luar negeri Presiden Kim yang menginginkan adanya hubungan yang harmonis terhadap Jepang sebagai negara tetangga. Oleh karena itu, Presiden Kim menyatakan bahwa Korea Selatan tidak seharusnya meminta ganti rugi atas persoalan *comfort women* kepada Jepang. Namun hal ini ditentang oleh publik Korea Selatan, sehingga Presiden Kim merubah arah kebijakan luar negerinya yang menyebabkan Jepang bersikap keras kepada Presiden Kim.<sup>10</sup>

Pada Februari 1996, Jepang meratifikasi *UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan mengklaim wilayah Zona Eksklusif di perairan Jepang yang mencakup Pulau Dokdo / Takeshima.<sup>11</sup> Dengan adanya pernyataan tersebut, Korea Selatan menentang keras klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo. Selain itu, Presiden Kim menunjukkan sikap keras dengan membangun dermaga di Pulau Dokdo serta rutin melakukan operasi gabungan. Tidak hanya pada isu tersebut, sikap keras Presiden Kim terhadap Jepang juga ditunjukkan pada isu *comfort women* yang meminta Jepang untuk memberikan kompensasi bagi wanita *comfort women*.<sup>12</sup> Perubahan arah kebijakan luar negeri Presiden Kim yang cenderung keras, memicu

---

<sup>9</sup> *Ibid* hal 12.

<sup>10</sup> Koji Kogotani, dkk. 2013. "Democracy and Diversionary Incentives in Japan - South Korea Disputes". *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 14 No. 1. Hal 19

<sup>11</sup> *Ibid* hal 20.

<sup>12</sup> *Ibid* hal 20.

ketegangan hubungan kedua negara semakin meningkat. Oleh karena itu, pada era ini dinamika hubungan kedua negara cukup fluktuatif.

Permasalahan pada era Kim Young Sam belum terpecahkan hingga Presiden Kim Dae Jung memimpin Korea Selatan. Berbeda dengan sikap Kim Young Sam, Presiden Kim Dae Jung cenderung melunak. Kim Dae Jung melihat persoalan sejarah seharusnya disikapi dengan terbuka. Hal ini terlihat ketika Presiden Kim melakukan kunjungan resmi pada tanggal 7 Oktober hingga 10 Oktober 1998 dengan agenda melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Keizo Obuchi untuk mengembalikan hubungan kedua negara. Dalam pertemuan ini menghasilkan deklarasi “*New Japan-ROK Partnership Toward the 21<sup>st</sup> Century*” yang bertujuan untuk meninjau ulang dan bertukar pandangan mengenai hubungan Korea Selatan dan Jepang di masa lalu dan di masa mendatang serta menegaskan kembali normalisasi hubungan di tahun 1965 dengan Jepang.<sup>13</sup> Kedua pemimpin negara tersebut menyadari akan pentingnya hubungan kerjasama kedua negara untuk memajukan serta menjaga keamanan baik di kawasan Asia Pasifik maupun internasional. Hal ini penting dilakukan karena mengingat Perang Dingin yang pernah terjadi membawa dampak buruk bagi kedua negara. Perdana Menteri Obuchi juga mengungkapkan permintaan maafnya terkait penjajahan di masa lalu yang membuat masyarakat Korea Selatan mengalami penderitaan secara serius.<sup>14</sup>

Pada era Presiden Kim inilah hubungan dengan Jepang mencapai titik terbaik pada masanya. Kedua negara sepakat untuk memperluas kerjasama militer mengingat Korea Utara telah meningkatkan aktivitas nuklirnya melalui *Taepodong Missile*. Kerjasama tersebut termasuk dalam pelatihan militer serta operasi laut yang dilakukan di wilayah Kyushu hingga teritori laut Korea Selatan. Pelatihan militer tersebut dilakukan Korea Selatan dan Jepang didukung dengan dua kapal angkutan laut milik Korea Selatan serta angkutan patroli milik Jepang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mofa. 1998. “Japan-Republic of Korea Joint Declaration A New Japan -Republic of Korea Partnership Towards The Twenty First Century” diakses melalui <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/korea/joint9810.html> pada 10 Mei 2022

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Op.cit* hal 15.

Selain itu, pencapaian Kim Dae Jung dalam meningkatkan kedudukan Korea Selatan serta hubungannya dengan Jepang juga terlihat pada pertemuan di tingkat internasional. Kim Dae Jung berhasil menginisiasi pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti *summit meeting* ASEAN+3 di Singapura yang dihadiri Jepang dan Cina. Serta pertemuan *summit meeting* ASEAN+3 yang kedua di Brunei.<sup>16</sup>

Memasuki awal era kepemimpinan Roh Moo-hyun tahun 2003, kemajuan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang masih dipertahankan oleh kedua negara. Presiden Roh Moo-hyun menyatakan akan menjaga hubungan dengan Jepang sebagai visi strategisnya di kawasan Asia Timur.<sup>17</sup> Untuk itu, Presiden Roh Moo-hyun meresmikan upacara *Korea-Japan Friendship Year 2005* sebagai peringatan hubungan normalisasi kedua negara selama 40 tahun.<sup>18</sup> Kedua negara berharap dengan adanya penguatan normalisasi hubungan dapat mendorong berbagai kerjasama yang dapat menguntungkan bagi Korea Selatan dan Jepang.

Namun pasca peringatan normalisasi hubungan, Korea Selatan dan Jepang mengalami gejolak kembali disebabkan oleh pernyataan Duta Besar Tokyo dalam konferensi pers yang menyebutkan bahwa Pulau Dokdo yakni pulau sengketa kedua negara adalah milik Jepang. Pernyataan tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat Korea Selatan. Presiden Roh Moo-hyun juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Jepang akibat pernyataan yang menyinggung masyarakat Korea Selatan. Presiden Roh menyatakan bahwa Pulau Dokdo tidak hanya secara geografis milik Korea, akan tetapi memiliki makna perjuangan yang mendalam akibat penjajahan di masa lalu sebab Pulau Dokdo ialah pulau pertama yang dianeksasi oleh Jepang.<sup>19</sup> Presiden Roh mendesak agar Jepang melakukan tindakan substantif dan memberikan pernyataan maaf kepada Korea Selatan setelah tindakan-tindakan kontroversial dilakukan oleh Jepang yakni seperti kunjungan

---

<sup>16</sup> *Ibid* hal.17.

<sup>17</sup> Emanuel Pastreich. 2005. "The Balancer : Roh Moo-hyun's Vision of Korean Politics and The Future of Northeast Asia". *The Asia Pacific Journal* Vol.3 Issue.8. Hal. 3. (14)

<sup>18</sup> KBS Indonesia. 2005. "Upacara Peresmian Tahun Persahabatan 2005 antara Korea Selatan dan Jepang". Diakses melalui [http://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=i&Seq\\_Code=7551](http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=7551) pada 15 Mei 2022.

<sup>19</sup> Mofa. 2006. "Special Message by President Roh Moo-hyun on Korea-Japan Relations". Diakses melalui [https://overseas.mofa.go.kr/does/brd/m\\_5794/view.do?seq=614951&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi\\_itm\\_seq=0&itm\\_seq\\_1=0&itm\\_seq\\_2=0&company\\_cd=&company\\_nm=&page=17](https://overseas.mofa.go.kr/does/brd/m_5794/view.do?seq=614951&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=17) pada 15 Mei 2022.

pejabat ke Kuil Yasukuni, permasalahan Pulau Dokdo serta masalah buku sejarah dan isu *comfort women* pada masa penjajahan.<sup>20</sup> Pada era Presiden Roh Moo-hyun terdapat persamaan dengan era Presiden Kim Young Sam sebab terlihat adanya pasang surut hubungan dengan Jepang. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketegangan hubungan kedua negara juga berkaitan erat dengan isu-isu sejarah dimasa lalu yang terbawa hingga menghambat hubungan kedua negara.

## **B. Isu Sejarah Terkait dengan Jepang**

Hubungan Korea Selatan dan Jepang tidak lepas dari isu sejarah yang terjadi pada kedua negara. Hal ini penting dibahas sebab isu sejarah mempengaruhi dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang. Isu sejarah merupakan persoalan yang timbul sebagai akibat kejadian dimasa lalu, ketika Jepang menjajah Korea Selatan. Terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang, sehingga muncul istilah anti-Jepang di Korea Selatan.

Pertama ialah persoalan mengenai Kuil Yasukuni. Kuil Yasukuni merupakan sebuah kuil Shinto tempat disemayamkannya para pahlawan Jepang di masa Perang Dunia 2. Bagi Jepang, kunjungan ke Kuil Yasukuni merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap para pahlawan.<sup>21</sup> Namun berbeda dengan Jepang, Korea Selatan menganggap Kuil Yasukuni sebagai tempat penjahat dan penjajah di masa peperangan, sehingga Korea Selatan menganggap Jepang telah mengingkari kejahatannya di masa perang. Oleh karena itu, kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni membuat masyarakat serta pejabat Korea Selatan tersinggung. Perbedaan pandangan antara Korea Selatan dan Jepang terhadap Kuil Yasukuni membuat gejolak kedua negara belum juga terselesaikan.<sup>22</sup>

Kunjungan resmi pejabat Jepang ke kuil Yasukuni pertama kali dilakukan pada tahun 1951 oleh Perdana Menteri Jepang, Yoshida Shigeru bersama dengan

---

<sup>20</sup> Hankyoreh. 2006. "Roh Urges Japan to Sincerely Repent for Past Wrongdoing". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/149274.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/149274.html) pada 16 Mei 2022.

<sup>21</sup> Reuters.2021. "Why Yasukuni Shrine is A Controversial Japan War Legacy". Diakses melalui <https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-08-13/explainer-why-yasukuni-shrine-is-a-controversial-symbol-of-japans-war-legacy> pada 20 Mei 2022.

<sup>22</sup> Harry Fiqri, dkk. 2016. "Perbandingan Kebijakan Korea Selatan Era Lee Myung Bak dan Park Geun Hye Terhadap Jepang Terkait Isu Kuil Yasukuni Sebagai Simbol Kejahatan Perang". *Journal of International Relation*, Vol.2. No.4. Hal 2.

anggota kabinet lainnya untuk menghadiri salah satu festival tahunan serta melakukan penghormatan di *Shuki Reitasai*.<sup>23</sup> Hingga kini setidaknya 100 pejabat telah mengunjungi kuil Yasukuni baik dalam kunjungan resmi maupun pribadi.<sup>24</sup> Hal ini membuat Korea Selatan menyatakan kekecewaannya yang mendalam sebab seolah pejabat Jepang menormalisasi kejahatan perang.<sup>25</sup>

**Gambar 2. 1 Kuil Yasukuni**



Sumber : JS Japan.2015. “Yasukuni Shrine, Spirits of Soldiers Are Enshrined As God”. Diakses melalui <http://www.jsjapan.com/archives/558> pada 25 Mei 2021

Kedua, isu sejarah terkait dengan Jepang tidak hanya terkait kuil Yasukuni, isu *comfort women* juga merupakan isu sensitif bagi masyarakat Korea Selatan. *Comfort women* atau wanita penghibur di masa penjajahan Jepang terhadap para perempuan Korea Selatan menuai respon negatif dari masyarakat Korea Selatan akibat sistem yang dijalankan oleh Jepang sebab para wanita korban *comfort women* dianggap sebagai pemuas dan hiburan bagi para tentara Jepang.

---

<sup>23</sup> Nippon.2014. “Yasukuni Shrine: The Basic”. Diakses melalui <https://www.nippon.com/en/features/h00071/#:~:text=Initially%20Yasukuni%20Shrine%20was%20conceived%20as%20a%20place,the%20deceased%2C%20and%20then%20to%20honor%20them%20publicly>. Diakses pada 1 Juni 2022.

<sup>24</sup> Reuters.2021. “Japan Lawmakers Visit Yasukuni Shrine, South Korea Protest”. Diakses melalui <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-lawmakers-visit-yasukuni-shrine-south-korea-protests-2021-12-07/>. Diakses pada 1 Juni 2022.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pada masa penjajahan Jepang, *comfort women* merupakan wanita penghibur yang dibentuk oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan seksual para tentara Jepang. Para wanita *comfort women* ditampung dalam *comfort women station* untuk melayani tentara Jepang. Sistem *comfort women* dijalankan oleh Jepang dengan dalih untuk mencegah penyebaran penyakit seksual serta melindungi wanita dari pemerkosaan di era tersebut.<sup>26</sup> Namun, bagi Korea Selatan sistem *comfort women* menyiksa para korban baik secara fisik maupun psikis. *Comfort women station* sebagai tempat tinggal para wanita penghibur memiliki kondisi yang memprihatinkan sebab diperlakukan secara tidak manusiawi. Para wanita penghibur sulit mendapatkan akses untuk makan dan minum serta sanitasi yang buruk. Selain itu, wanita penghibur juga secara rutin diperkosa oleh tentara Jepang setiap hari.<sup>27</sup> Pengalaman pahit ini yang kemudian membuat masyarakat Korea Selatan berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi para korban.

Ketiga, tidak hanya isu *comfort women* yang memicu kekecewaan masyarakat Korea Selatan, isu sengketa Pulau Dokdo juga memiliki persoalan yang sama rumitnya. Sengketa Pulau Dokdo berawal dari pernyataan deklarasi kedua negara tahun 1996 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam pernyataannya, kedua negara sama-sama mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah milik masing-masing kedua negara.<sup>28</sup> Pulau Dokdo ialah pulau karang yang memiliki cadangan gas yang cukup besar memiliki dua pulau utama yakni Pulau Barat dan Pulau Timur. Adanya perbedaan pandangan terhadap status Pulau Dokdo menyebabkan hubungan kedua negara mengalami ketegangan. Ketegangan hubungan juga semakin meningkat apabila salah satu negara melakukan aktivitas seperti kunjungan ke Pulau Dokdo Hal tersebut memicu kemarahan publik dan pemerintah baik Jepang ataupun Korea Selatan terhadap aktivitas yang dilakukan di pulau tersebut. Jepang dan Korea Selatan pada dasarnya menginginkan adanya penyelesaian sengketa Pulau Dokdo, oleh karena itu kedua negara mengupayakan

---

<sup>26</sup> Thomas J Ward dan William D Lay. 2018. "The Origins and Implementation of the Comfort Women System". Diakses melalui <https://www.e-ir.info/2018/12/14/the-origins-and-implementation-of-the-comfort-women-system/> pada 25 Mei 2020.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Utami Gita Safitri dkk. 2013. "Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan". *Journal of USU International Law*. Vol 1, No.2. 2013.

rekonsiliasi yang dilakukan melalui negosiasi yang dilakukan kedua negara. Namun, rekonsiliasi belum menemukan titik terang.

Keberadaan Pulau Dokdo yang sering memicu ketegangan hubungan Korea Selatan dan Jepang, permasalahan *comfort women* dan persoalan Kuil Yaskuni yang merupakan faktor utama isu sejarah Korea Selatan dan Jepang, terdapat benang merah yang dapat ditarik yakni adanya perbedaan interpretasi yang tajam dan sulit bagi kedua negara untuk memisahkan permasalahan tersebut dengan persoalan lain, sehingga hal tersebut memicu gejolak kedua negara. Adanya perbedaan persepsi mengenai suatu persoalan menyebabkan masalah semakin rumit, sebab tidak hanya berdampak terhadap hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang, akan tetapi juga perspektif negatif publik terhadap Jepang. Permasalahan tersebut menjadi tumpang tindih dan semakin sulit untuk menemukan titik terang.

Disisi lain buruknya hubungan Korea Selatan dan Jepang, kedua negara memiliki satu pandangan yang sama yakni terlepas dari hubungan tersebut, baik Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara yang tidak dapat dipisahkan dan akan terus saling membutuhkan. Oleh karena itu, Korea Selatan dan Jepang tetap menjalin kerjasama sebagai upaya untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan negara. Korea Selatan dan Jepang saling memahami bahwa sebagai negara tetangga perlu upaya untuk mencapai keharmonisan, setelah berbagai persoalan melanda kedua negara. Untuk mencapai kepentingan masing-masing negara, kerjasama yang dilakukan juga diharapkan mampu mengatasi ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.

Selain itu, Korea Selatan dan Jepang juga memiliki satu ancaman bersama yang datang dari Korea Utara. Provokasi yang semakin meningkat menyebabkan keamanan wilayah Korea Selatan dan Jepang terancam. Dengan adanya ancaman tersebut membuat Korea Selatan dan Jepang memiliki pandangan yang sama untuk meminimalisir ancaman dengan menjalin kerjasama khusus di bidang militer.

### C. Dorongan dari Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan mitra utama Korea Selatan dalam menjalin kerjasama salah satunya yakni dalam bidang keamanan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan memiliki kedekatan sejak intervensi yang dilakukan oleh Amerika pasca perang Dunia 2. Sejak saat itu, Amerika Serikat berupaya memberikan bantuan ekonomi maupun keamanan bagi negara-negara di kawasan Asia Timur melalui skema kerjasama. Bagi Amerika Serikat, keamanan di wilayah Asia Timur atau Pasifik Barat merupakan bagian dari perwujudan keamanan nasionalnya, sehingga Amerika Serikat turut berperan aktif ketika Asia Timur mengalami gejolak keamanan.<sup>29</sup>

Meskipun Amerika Serikat terletak sejauh 10.751 km dari kawasan Asia Timur, akan tetapi Amerika Serikat memiliki peran yang besar bagi keamanan Korea Selatan.<sup>30</sup> Hubungan keduanya semakin erat setelah penandatanganan *Mutual Defense Treaty* tahun 1953 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa jika ada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mendapat serangan dari pihak lain, maka negara lainnya akan bertindak menjadikan hal tersebut sebagai masalah bersama. Melalui penandatanganan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Korea Selatan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan internasional dengan mengupayakan perdamaian dan keamanan. Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga akan berkonsultasi bersama terkait dengan serangan yang mengancam keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat berdasarkan perhitungan dalam konsultasi dan perjanjian. Sesuai dengan isi perjanjian sebagai berikut :

*“The Parties undertake to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, or obligations assumed by any Party toward the United Nations”.*<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sony Irawan. 2017. “Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Nuklir Korea Utara” *Jurnal International & Diplomacy USNI*. Vol.3, No.1. Hal.

<sup>30</sup> Geodatos. 2022. “Distance from United States and South Korea”. Diakses melalui <https://www.geodatos.net/en/distances/countries/from-united-states-to-south-korea> pada 24 Juni 2022.

<sup>31</sup> USFK. “Mutual Defense Treaty Between United States and the Republic of Korea October 1, 1953”. Diakses melalui



(Para Pihak berjanji untuk menyelesaikan setiap perselisihan internasional di mana mereka dapat terlibat dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan dan keadilan internasional tidak terancam dan untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan dengan cara apa pun yang tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau kewajiban yang diimban oleh Pihak manapun terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa)

*“The Parties will consult together whenever, in the opinion of either of them, the political independence or security of either of the Parties is threatened by external armed attack. Separately and jointly, by self help and mutual aid, the Parties will maintain and develop appropriate means to deter armed attack and will take suitable measures in consultation and agreement to implement this Treaty and to further its purposes”*.<sup>32</sup>

(Para Pihak akan berkonsultasi bersama setiap kali, menurut pendapat salah satu dari mereka, independensi politik atau keamanan salah satu Pihak terancam oleh serangan bersenjata eksternal. Secara terpisah dan bersama-sama, dengan bantuan sendiri dan gotong royong, Para Pihak akan memelihara dan mengembangkan cara yang tepat untuk mencegah serangan bersenjata dan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam konsultasi dan kesepakatan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan untuk memajukan tujuannya)

Pasca perjanjian tersebut, Amerika Serikat aktif melakukan bantuan militer di wilayah Korea Selatan. Bantuan yang diberikan AS kepada Korea Selatan dilakukan dengan menempatkan pasukan militer dan latihan gabungan yang beroperasi sejak tahun 1957 melalui *United States Force Korea* (USFK). Hingga tahun 2016, jumlah pasukan militer Amerika Serikat mencapai 35.000 personil.<sup>33</sup> Bagi Amerika Serikat, dengan disepakatinya *Mutual Defense Treaty* tidak hanya memperkuat sistem pertahanan Korea Selatan, namun memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk memantau pergerakan Cina sebagai negara kompetitor utama AS.<sup>34</sup>

---

[https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H\\_Mutual%20Defense%20Treaty\\_1953.pdf](https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H_Mutual%20Defense%20Treaty_1953.pdf) pada 24 Juni 2022.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Edward Giovanni Marpaung. “Aliansi Militer Amerika Serikat Dan Korea Selatan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016)”. Universitas Komputer Indonesia. 2017: hlm. 4

<sup>34</sup> Kongdan Oh. 2008. “US-ROK : The Forgotten Alliance”. Diakses melalui <https://www.brookings.edu/opinions/u-s-rok-the-forgotten-alliance/> pada 25 Juni 2022.

Bantuan keamanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Korea Selatan tidak lepas dari ancaman Korea Utara yang semakin meningkat. Baik Amerika Serikat maupun Korea Selatan memandang bahwa persepsi ancaman utama di kawasan Semenanjung Korea masih difokuskan pada proliferasi nuklir Korea Utara. Ancaman tersebut semakin nyata setelah beberapa kali uji coba nuklir Korea Utara mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016.<sup>35</sup>

Dengan adanya pemahaman yang sama terkait dengan ancaman dari peningkatan nuklir Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan mengembangkan dan menempatkan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi kerjasama *Ballistic Missile Defense* (BMD) yang bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan Korea Selatan. THAAD merupakan sistem anti rudal yang dikembangkan oleh AS memiliki kemampuan untuk memburu dan meledakan rudal milik musuh dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.<sup>36</sup> Meskipun pada pembicaraan penempatan THAAD sempat mengalami kendala, namun pada tahun 2016, Presiden Park Geun Hye akhirnya membuka diri untuk melakukan pembahasan resmi terkait dengan rencana penempatan THAAD dengan Amerika Serikat. Kedua negara menyadari akan urgensi kerjasama keamanan yang semakin dibutuhkan. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir yang ke-4, sehingga Korea Selatan berupaya untuk mempertahankan sistem pertahanannya.

Upaya Amerika Serikat dan Korea Selatan mempertahankan keamanan Korea Selatan melalui kerjasama keamanan salah satunya yakni rencana penempatan THAAD tahun 2017 di Korea Selatan, faktanya Korea Utara tidak gentar melakukan serangan. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menyadari bahwa perlu adanya strategi komprehensif untuk menghalau aktivitas nuklir Korea Utara. Mengingat kegagalan juga terjadi pada perundingan *Six Party Talk* dengan Korea Utara, maka diperlukan formulasi strategi yang baru, yakni diwujudkan

---

<sup>35</sup> Sony Irawan. *Op.Cit.* hal 104.

<sup>36</sup> Indrayanti Pringgodigdo. 2019. "Kebijakan Penempatan Sistem Anti Rudal Amerika Serikat di Korea Selatan" *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.7 No.1. Hal 218.

dengan memperkuat aliansi trilateral Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.<sup>37</sup> Upaya memperkuat aliansi trilateral dengan Jepang juga disebabkan karena Jepang merupakan negara yang secara tidak langsung terdampak pada aktivitas nuklir Korea Utara. Pada percobaan keempat, Korea Utara meluncurkan tiga rudal kearah Laut Jepang.<sup>38</sup> Hal tersebut tentunya memberikan ancaman pula bagi wilayah Jepang. Selain itu, Jepang juga dinilai memiliki teknologi canggih, sehingga penggabungan tiga negara antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang harus ditekankan melalui program-program khusus serta dikombinasikan dengan keunggulan militer atau kecanggihan teknologi masing-masing negara.

Disisi lain, Amerika Serikat menyadari hubungan antara Korea Selatan dan Jepang terbentur oleh permasalahan sejarah yang berakibat pada ketidakharmonisan hubungan kedua negara. Amerika Serikat sebagai mitra kedua negara memahami hal tersebut, akan tetapi bagi Amerika Serikat terdapat isu yang lebih penting terkait dengan keamanan di wilayah Semenanjung Korea, sehingga Amerika Serikat mendukung Korea Selatan dan Jepang untuk saling melunakan hubungannya termasuk untuk mendorong Korea Selatan dan Jepang menyepakati kerjasama GSOMIA yang terlihat dari pertemuan-pertemuan ketiga negara membahas nuklir Korea Utara. Bentuk dukungan AS terlihat dari pernyataan Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Ash Carter yang menyambut dengan baik adanya kerjasama GSOMIA Korea Selatan dan Jepang di tahun 2016 sebagai berikut :

*“I welcome the approval by the Republic of Korea and Japan of a General Security of Military Information Agreement, The ROK-Japan GSOMIA will enable increased information sharing and strengthen cooperation between our two closest allies in Northeast Asia. By sharing appropriate security information, they will enhance their deterrence posture against North Korean aggression and strengthen their ability to defend against continued missile launches and nuclear tests, both of which are explicitly prohibited by U.N. Security Council resolutions”*

(Saya menyambut baik persetujuan Republik Korea dan Jepang atas *General Security of Military Information Agreement*, GSOMIA Korea

---

<sup>37</sup> Sony Irawan. *Op.Cit.* Hal. 111

<sup>38</sup> BBC. 2016. “Korea Utara Tembakkan 3 Rudal Balistik”. Diakses melalui [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160719\\_dunia\\_rudal\\_korut](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160719_dunia_rudal_korut) pada 28 Juni 2022.

Selatan-Jepang akan memungkinkan peningkatan berbagi informasi dan memperkuat kerja sama di antara dua sekutu terdekat kami di Asia Timur Laut. Dengan membagikan informasi keamanan yang sesuai, mereka akan meningkatkan postur penangkalan mereka terhadap agresi Korea Utara dan memperkuat kemampuan mereka untuk bertahan dari peluncuran rudal dan uji coba nuklir yang berkelanjutan, yang keduanya secara eksplisit dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB)

Pada awal kepemimpinan Presiden Park, hubungan Korea Selatan dan Jepang cukup renggang. Hal ini berlangsung hingga akhirnya Presiden Amerika Serikat berhasil mempertemukan Presiden Park dengan Perdana Menteri Jepang untuk pertama kalinya di sela-sela KTT Nuklir Internasional 2014.<sup>39</sup> Dalam pertemuan tersebut, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa untuk menghadapi ancaman Korea Utara, perlu adanya kerjasama yang erat antara tiga negara. Amerika Serikat mendesak Korea Selatan dan Jepang untuk segera menormalisasikan hubungan, sehingga dapat berfokus pada aktivitas Korea Utara.<sup>40</sup> Dalam pernyataan Presiden Barack Obama mengingatkan kepada kedua negara untuk memperkuat aliansi, sehingga perlu untuk menormalisasikan hubungan kedua negara terlebih dahulu :

*“...Our alliances with South Korea and Japan uphold regional peace and security. So our meeting today is a reflection of the United States’ critical role in the Asia Pacific region, but that role depends on the strength of our alliances...”<sup>41</sup>*

(Aliansi kami dengan Korea Selatan dan Jepang menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan regional. Jadi pertemuan kami hari ini adalah cerminan dari peran penting Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, tetapi peran itu tergantung pada kekuatan aliansi kami)

---

<sup>39</sup> Ankit Panda. 2014. “Shinzo Abe and Park Geun-hye Will Meet For The First Time On The Sidelines of The Nuclear Security Summit 2014” Diakses melalui <https://thediplomat.com/2014/03/shinzo-abe-park-geun-hye-to-meet-at-nuclear-security-summit/> 1 Juli 2022.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> The Obama White House 2014. “Remarks by President Barack Obama, President Park of the Republic of Korea and Prime Minister Abe of Japan”. Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/25/remarks-president-obama-president-park-republic-korea-and-prime-minister> pada 6 September 2022.

**Gambar 2.2.**  
**Pertemuan Pertama Presiden Park Geun Hye dengan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2014**



Sumber: Reuters. 2014. Obama Brings U.S Allies South Korea and Japan Together for Talks. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-japan-korea-trilateral-idUSBREA2O1OT20140325> pada 6 Agustus 2022.

Sikap Presiden Park yang mulai melunak terhadap Jepang, tidak lepas dari kontribusi Amerika Serikat mempertemukan kedua kepala negara. Pertemuan tersebut penting bagi ketiga negara sebab secara khusus ketiga negara memiliki pemahaman yang sama terkait eskalasi nuklir Korea Utara. Hubungan Korea Selatan dan Jepang semakin mencapai pada puncaknya, setelah Presiden Park mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu *comfort women* di tahun 2015 hingga menghasilkan *Agreement of 2015* dengan Jepang. Hal ini menunjukkan pertemuan ketiga negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2014 mempengaruhi Presiden Park untuk bersikap rasional, yakni segera menyelesaikan isu *comfort women* yang telah berlangsung lama. Pada tahun 2016, Amerika Serikat kembali mempertemukan Presiden Park dan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk kembali membahas serta memperkuat sistem pertahanan dari nuklir Korea Utara. Dalam pertemuan tersebut terdapat keputusan untuk melakukan pelatihan bersama ketiga negara dalam Angkatan Laut melalui *Rim of the Pacific*

(RIMPAC) yang berfokus pada pengoperasian kapal anti misil untuk menghadapi Korea Utara.<sup>42</sup>

**Gambar 2.3**  
**Pertemuan Kedua Presiden Barack Obama, Presiden Park Geun Hye dan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2016**



Sumber : The Obama White House. 2016. “Remarks by President Barack Obama, President Park Geun Hye and Prime Minister Shinzo Abe. Diakses melalui <https://youtu.be/-T3rsO7Q08Q> pada 4 Juli 2022.

Presiden Barack Obama sebagai *host* pada pertemuan tersebut menekankan kembali bahwa untuk memperkuat pertahanan dari ancaman Korea Utara perlu adanya kerjasama yang kuat dari ketiga negara. Sebagai negara ketiga dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang, Amerika Serikat berperan penting dalam menyatukan persepsi kedua negara untuk fokus pada ancaman nuklir Korea Utara yang semakin meningkat. Hal ini tampak dari pernyataan Presiden Barack Obama sebagai berikut :

*...”And we are united in our efforts to deter and defend against North Korea provocations. We recognize that our security is linked, that we have to meet this challenge. And we also recognize that it is important to the entire international community to vigilantly enforce the strong U.N security measures that were passed in light of some of the ballistic missile and nuclear activity that Pyongyang has been engaging in. We agreed during*

---

<sup>42</sup> Ankit Panda. 2016. “US, Japan, South Korea Plan Missile Defense Exercise on RIMPAC 2016 Sidelines” Diakses melalui <https://thediplomat.com/2016/05/us-japan-south-korea-plan-missile-defense-exercise-on-rimpac-2016-sidelines/> pada 6 September 2016.

*this meeting that trilateral security cooperation is essential to maintaining peace and stability in Northeast Asia, deterring the North Korean nuclear threat and the potential of nuclear proliferation as a consequence of North Korean activities. And in our meeting, we discussed ways to deepen the cooperation...*<sup>43</sup>

...(Dan kami bersatu dalam upaya kami untuk mencegah dan membela diri dari provokasi Korea Utara. Kami menyadari bahwa keamanan kami terkait, bahwa kami harus memenuhi tantangan ini. Dan kami juga menyadari bahwa penting bagi seluruh komunitas internasional untuk dengan waspada menegakkan langkah-langkah keamanan PBB yang kuat yang disahkan sehubungan dengan beberapa rudal balistik dan aktivitas nuklir yang telah dilakukan Pyongyang. Kami sepakat selama pertemuan ini bahwa kerja sama keamanan trilateral sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur Laut, mencegah ancaman nuklir Korea Utara dan potensi proliferasi nuklir sebagai konsekuensi dari kegiatan Korea Utara. Dan dalam pertemuan kami, kami membahas cara-cara untuk memperdalam kerja sama)...

Pada pertemuan tersebut, Presiden Park juga menyatakan kekhawatirannya terhadap aktivitas nuklir Korea Utara, sehingga ketiga negara perlu melakukan diskusi mendalam terkait dengan apa yang harus dilakukan bersama agar Korea Utara berhenti melakukan aktivitas nuklirnya. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

*... "In light of the security situation on the Korean Peninsula and in Northeast Asia in the wake of North Korea's fourth nuclear test, just the mere fact that we three leaders have gathered in one spot in and of itself carries huge significance. First of all, on the North Korean nuclear issue, which represent a shared challenge confronting all three countries. Today's, meeting has led in-depth discussions on what our three countries should do together in order to stop North Korea from upgrading its nuclear capabilities and alter its misguided calculus. And we further reinforced our coordination towards North Korea..."*<sup>44</sup>

...(Mengingat situasi keamanan di Semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut setelah uji coba nuklir Korea Utara yang akan datang, hanya fakta bahwa kami tiga pemimpin telah berkumpul di satu tempat dengan sendirinya membawa signifikansi yang sangat besar. Pertama-tama, tentang masalah nuklir Korea Utara, yang merupakan tantangan bersama yang dihadapi ketiga negara. Pertemuan hari ini telah memimpin diskusi

---

<sup>43</sup> The Obama White House. 2016. "Remarks by President Barack Obama, President Park Geun Hye and Prime Minister Shinzo Abe. Diakses melalui <https://youtu.be/-T3rsO7Q08Q> pada 4 Juli 2022.

<sup>44</sup> *Ibid.*

mendalam tentang apa yang harus dilakukan negara-negara kita bersama untuk menghentikan Korea Utara meningkatkan kemampuan nuklirnya dan mengubah kalkulusnya yang salah arah. Dan kami semakin memperkuat koordinasi kami terhadap Korea Utara)...

**Tabel 2.1. Pertemuan Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang**

Tahun	Kesepakatan
2014	Memperkuat kerjasama ketiga negara untuk menghadapi Korea Utara.
2016	Latihan militer bersama melalui <i>Rim of The Pacific</i> (RIMPAC).

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2022.

Dalam tabel tersebut terlihat terjadi dua kali pertemuan antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang yakni pada tahun 2014 dan tahun 2016. Setelah rangkaian pertemuan ketiga negara pada tahun 2014 hingga pertemuan pada tanggal 31 Maret 2016, terlihat perubahan sikap Presiden Park terhadap Jepang. Setelah pertemuan pertama, Korea Selatan menyadari untuk menghadapi Korea Utara perlu kerjasama dengan Jepang sebagai negara yang memiliki kapabilitas militer yang canggih. Oleh sebab itu, Korea Selatan melakukan normalisasi hubungan dengan menyelesaikan isu *comfort women* di tahun 2015. Hal ini terbukti dari *Agreement of 2015* sebagai bentuk penyelesaian masalah *comfort women*. Lalu berlanjut pada pertemuan kedua, ketiga negara masih membahas terkait dengan ancaman nuklir Korea Utara. Pada pertemuan tersebut, Presiden Barack Obama menekankan pentingnya kerjasama diantara ketiga negara. Tidak lama setelah pertemuan kedua, Korea Selatan dan Jepang akhirnya memulai dialog pada tanggal 1 November 2016 untuk membahas mengenai kerjasama GSOMIA yang sebelumnya gagal dilaksanakan di tahun 2012 hingga mencapai kesepakatan pada 23 November 2016. Hal ini menunjukkan adanya indikasi keberhasilan Amerika Serikat dalam mendorong kedua negara untuk melakukan kerjasama setelah terjadi pertemuan tersebut. Meskipun tidak ada pernyataan secara langsung oleh Presiden Park Geun-hye terkait alasannya menyepakati kerjasama GSOMIA dengan Jepang karena



dorongan dari Amerika Serikat, namun hal ini dapat dilihat dari *timeline* pertemuan-pertemuan penting ketiga negara serta perubahan sikap Presiden Park terhadap Jepang setelah pertemuan tersebut.

Dalam kondisi domestik yang tidak menyetujui kerjasama GSOMIA, namun Presiden Park memiliki pertimbangan untuk tetap menyetujui kerjasama GSOMIA. Hal ini sesuai dengan misi utamanya sebagai arah kebijakan keamanan Korea Selatan untuk fokus membangun sistem pertahanan yang kuat (*deterrence*), oleh sebab itu kerjasama GSOMIA merupakan jembatan awal untuk mewujudkannya.<sup>45</sup> Hal ini menunjukkan Amerika Serikat berhasil mendorong Presiden Park untuk melakukan normalisasi hubungan yang ditandai dengan kesepakatan kerjasama GSOMIA sebab sesuai dengan *Mutual Defense Treaty* antara Korea Selatan dan Amerika Serikat bahwa kedua negara akan saling berkonsultasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Presiden Park sebagai berikut :

*“The government is making sure our military readiness is solid and also making through preparations for non-military provocations including cyber-attacks and acts of terrorism in public places. To maintain robust deterrence against the North, the government is enhancing the Korea-US combined defense capability and engaging in consultations with the US to improve our alliance’s missile defense posture.”*<sup>46</sup>

(Pemerintah memastikan kesiapan militer kita solid dan juga melalui persiapan untuk provokasi non-militer termasuk serangan dunia maya dan tindakan terorisme di tempat-tempat umum. Untuk mempertahankan penangkalan yang kuat terhadap Korea Utara, pemerintah memberlakukan kemampuan pertahanan gabungan Korea-AS dan terlibat dalam konsultasi dengan AS untuk meningkatkan postur pertahanan rudal aliansi kami).

---

<sup>45</sup> Siska Ayu Angraini. *Op.Cit.*

<sup>46</sup> Arirang Issue. 2016. “President Park Geun-hye on North Korea”. Diakses melalui <https://youtu.be/h6nbQe4u3Tk> pada 26 Juli 2022.

#### **D. Kerjasama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA)**

Kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang dalam menghadapi nuklir Korea Utara pada awalnya dilakukan secara trilateral dengan melibatkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Cina. Secara khusus Korea Selatan dan Jepang menginginkan adanya kerjasama militer yang lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir ancaman nuklir Korea Utara. Kerjasama militer secara bilateral dianggap lebih memproyeksikan keinginan kedua negara.

Pembahasan mengenai kerjasama militer tercetus pertama kali saat pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan yakni Kim Kwan Jin dengan Menteri Pertahanan Jepang, Toshimi Kitazawa pada tahun 2010.<sup>47</sup> Pembahasan kerjasama militer tersebut berkaitan dengan provokasi yang sebelumnya dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan melalui penyerangan pulau Yeonpyeong serta penembakan kapal Cheonan.<sup>48</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Selatan sebab Korea Utara semakin menunjukkan arogansinya pada Korea Selatan. Dalam pembahasan kerjasama tersebut terdapat dua kerjasama yang ingin dijalin oleh kedua negara, yaitu kerjasama *Acquisition and Cross-Servicing Agreement* (ACSA) yang merupakan kerjasama pertukaran serta pengadaan amunisi militer dan kerjasama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yakni kerjasama pertukaran informasi militer. Isi dari perjanjian GSOMIA pada tahun 2016 merujuk pada perjanjian GSOMIA pada tahun 2012, sehingga tidak mengalami perubahan secara signifikan. Secara garis besar isi perjanjian GSOMIA adalah sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> *Op.Cit* hal.21

<sup>48</sup> M Najeri Al Syahrin. 2018. *Keamanan Asia Timur : Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Yogyakarta. Komojoyo Press. Hal.27.

**Tabel 2.2. Garis Besar Perjanjian GSOMIA Tahun 2016**

Tujuan	Setiap negara menjamin kerahasiaan informasi yang disebut sebagai <i>Classified Military Information</i> (CMI) sesuai dengan ketentuan di bawah ini.
Definisi	CMI diartikan sebagai informasi rahasia yang berkaitan dengan pertahanan militer yang digunakan oleh kedua negara.
Klasifikasi dan Tanda Keamanan	Setara dengan keamanan nasional masing-masing negara
Tambahan Implementasi	Tambahan pelaksanaan akan dilakukan oleh otoritas yang berkompeten (di bawah pemerintah )
Aturan perlindungan Informasi Rahasia	Tidak dapat dibagikan kepada pihak lain serta tidak digunakan selain dalam kepentingan perjanjian. Setiap fasilitas pemerintah yang digunakan untuk mengelola CMI dilakukan oleh personil keamanan. Selain itu, prosedur untuk identifikasi, lokasi serta inventaris dikelola oleh pihak yang berkompeten.
Personil Keamanan	Setiap negara menjamin personil keamanan yang berkompeten serta konsisten terhadap kepentingan negara.
Kunjungan	Otoritas kunjungan dibatasi oleh tujuan untuk mengakses CMI.
Transmisi Informasi	CMI akan ditransmisikan antar para pihak dari pemerintah ke pemerintah. Setelah pengiriman informasi, pihak penerima harus bertanggung jawab atas kontrol dan keamanan CMI.
Fasilitas Keamanan	Setiap negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi keamanan yang ditujukan untuk menjaga dan mengontrol CMI
Kebutuhan keamanan transmisi informasi	Dalam menjaga keamanan informasi, diklasifikasikan menjadi beberapa bagian : 1. Dokumen atau media : <i>sealed and innermost envelop.</i> 2. Alat : <i>sealed, covered vehicles or be securely packaged or protected.</i> 3. Elektronik : keamanan informasi menggunakan enkripsi
Biaya	Setiap negara menanggung biaya yang dikeluarkan untuk perjanjian ini sesuai dengan budget masing-masing negara.

Penyelesaian masalah	Masalah yang timbul karena perbedaan interpretasi perjanjian ini, maka akan diselesaikan kedua pihak dengan cara konsultasi.
Kekuatan, Amandeman, Durasi dan Penghentian	Perjanjian ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Sumber : Ministry of Foreign Affairs Japan. 2016. "General Security of Military Agreement". Diakses melalui <https://www.mofa.go.jp/files/000205833.pdf> pada 13 Juni 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa skema kerjasama GSOMIA ialah dengan berbagi informasi militer yang berkaitan dengan aktivitas Korea Utara. Aktivitas yang dimaksud ialah seperti uji coba nuklir dan rudal Korea Utara yang dilakukan pada bulan januari 2016 yakni uji coba nuklir yang ke-4.<sup>49</sup> Segala pergerakan Korea Utara merupakan informasi rahasia yang dapat diberikan melalui otoritas yang berkompeten di bawah pemerintah Korea Selatan dan Jepang. Dengan adanya kerjasama GSOMIA, radar Korea Selatan yang tidak dapat menjangkau aktivitas nuklir Korea Utara ke arah Laut Timur karena sudah masuk teritorial Jepang dapat dipantau oleh Jepang sebab Jepang memiliki dua radar X-Band jenis TYP-2 yang ditempatkan di Aomori wilayah bagian utara Jepang serta radar X-Band jenis AN/TYP-2 di wilayah Kyotango, Laut Timur Jepang yang telah ditempatkan di Laut Timur Jepang sejak tahun 2013. Radar tersebut memiliki kemampuan untuk melacak berbagai macam jenis rudal balistik dan dapat mengidentifikasi objek kecil dalam kejauhan,<sup>50</sup> Radar milik Jepang juga digunakan sebagai pusat sistem sensor, sehingga radar tersebut sangat vital untuk menghalau nuklir Korea Utara. Sedangkan aktivitas peluncuran rudal yang masuk pada wilayah teritorial Korea Selatan, sehingga tidak dapat dideteksi oleh Jepang dapat dipantau oleh Korea Selatan menggunakan radar Swedish-Arthur yang dapat mendeteksi artileri jarak jauh serta dapat mengirim data ke sistem komando dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, informasi tersebut penting bagi Jepang<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Sony Irawan, hal 104.

<sup>50</sup> Tamir Eshel. 2013. "New Anti-Missile Radar to Bolster Missile Defense Over The Pacific Ocean". Diakses melalui [https://defense-update.com/20130224\\_x-band\\_radar\\_in\\_japan.html](https://defense-update.com/20130224_x-band_radar_in_japan.html) pada 16 Agustus 2022.

<sup>51</sup> SAAB. 2009. "South Korea Accepts The First Arthur WLR System" Diakses melalui <https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2009/south-korea-accepts-the-first-arthur-wlr-system> pada 16 Agustus 2022.

Melalui kerjasama tersebut, Korea Selatan dan Jepang memiliki satu misi bersama untuk meningkatkan kewaspadaannya dari Korea Utara. Mekanisme kerjasama GSOMIA dilakukan dengan memberikan informasi militer yang bersifat rahasia baik secara visual, oral maupun elektronik. Di bawah kerjasama GSOMIA, informasi yang diberikan hanya informasi selektif dari kasus per kasus, sehingga kerjasama ini tidak terkait dengan penyatuan militer Jepang dan Korea Selatan ataupun penyatuan sistem militer. Selain itu, Korea Selatan akan mendapatkan akses langsung ke informasi yang dikumpulkan oleh Jepang, sehingga informasi yang didapatkan Korea Selatan akurat dan dapat diandalkan.<sup>52</sup> Dalam peraturan kerahasiaan kerjasama GSOMIA, masing-masing negara diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi militer dari pihak ke-tiga serta informasi tersebut tidak dapat digunakan selain untuk kepentingan dalam perjanjian. Sedangkan untuk informasi yang diberikan ialah informasi terpercaya yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya dibawah naungan pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keterpercayaan informasi yang diberikan masing-masing negara, terdapat personil *security clearance* yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kelayakan informasi militer, sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid.

Dalam perjanjian GSOMIA juga disebutkan bahwa peraturan tersebut harus sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara masing-masing. Hal ini berkaitan dengan media atau dokumen yang diberikan harus menyesuaikan hukum nasional yang mengatur mengenai hak intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak paten yang berlaku di masing-masing negara, sehingga negara perlu mengobservasinya terlebih dahulu. Jangka waktu dalam kerjasama GSOMIA berlaku selama satu tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak menginformasikan pembatalan kerjasama sekurang-kurangnya 90 hari sejak jangka waktu akan habis seperti kutipan dibawah ini<sup>53</sup> :

---

<sup>52</sup> Ministry of National Defense Republic of Korea. 2016. "Defense White Paper 2016". Diakses melalui [https://www.mnd.go.kr/cop/pblict/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN\\_03130000000](https://www.mnd.go.kr/cop/pblict/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_03130000000) pada 13 Juni 2022.

<sup>53</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2016. "Agreement of General Security of Military Information Agreement". Diakses melalui <https://www.mofa.go.jp/files/000205833.pdf> pada 13 Juni 2022.

*“This Agreement shall remain in force for a period of one year and shall be automatically extended annually thereafter unless either Party notifies the other in writing through the diplomatic channel ninety days in advance of its intention to terminate the Agreement”*<sup>54</sup>

(Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun setelahnya kecuali salah satu Pihak memberitahu pihak lain secara tertulis melalui saluran diplomatik sembilan puluh hari sebelumnya tentang niatnya untuk mengakhiri Perjanjian)

Pasca naiknya Lee Myung Bak menjadi Presiden Korea Selatan pada tahun 2008, Presiden Lee mengarahkan kebijakan strategisnya untuk mewujudkan Korea Selatan sebagai negara yang *“mature global state”*.<sup>55</sup> Presiden Lee berambisi untuk membawa Korea Selatan sebagai negara yang aktif di komunitas internasional dan meningkatkan pengaruhnya di kancah dunia. Oleh karena itu, Presiden Lee memiliki slogan Global Korea sebagai pedoman kepemimpinannya.

Selain itu dalam menentukan kebijakan luar negerinya, Presiden Lee membuat empat arah kebijakan yakni mempromosikan eksistensi dan kesejahteraan hubungan inter-Korea, memperluas jaringan diplomasi yang kooperatif, mempromosikan kebijakan luar negeri yang komprehensif dan pragmatis, serta membangun sistem keamanan yang berorientasi pada masa depan.<sup>56</sup> Untuk mewujudkan kebijakan luar negeri, Presiden Lee memandang bahwa Jepang sebagai negara yang penting untuk mewujudkan diplomasi yang kooperatif. Oleh karena itu, Presiden Lee berupaya melakukan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi dan keamanan.

Kerjasama keamanan menjadi perhatian Lee setelah adanya serangan yang meningkat terkait dengan Korea Utara pada tahun 2010. Pada 26 Maret Korea Utara diduga telah melakukan serangan pada kapal Cheonan hingga menyebabkan kapal tersebut tenggelam dan menewaskan 46 awak kapal. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh Korea Utara dengan menggunakan rudal kapal selam. Tidak lama setelah itu, pada bulan November Korea Utara kembali menyerang Korea Selatan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Op.cit* hal.18.

<sup>56</sup> *Ibid* hal.18.

dengan membombardir pulau Yeonpyeong yang merupakan markas latihan militer Korea Selatan menggunakan artileri. Dalam serangan tersebut mengakibatkan 2 tentara tewas dan 15 tentara dan 3 warga sipil luka-luka.<sup>57</sup> Adanya dua serangan tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara tengah meningkatkan agresivitasnya. Dalam hal ini Presiden Lee menyatakan akan memperkuat sistem pertahanan Korea Selatan pasca serangan tersebut dengan bekerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini terbukti dari pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan dengan Menteri Pertahanan Jepang pada 10 Januari 2011 untuk membahas kerjasama keamanan bersama.<sup>58</sup>

Pembahasan kerjasama keamanan kemudian mengerucut pada kerjasama GSOMIA dengan skema berbagi informasi militer terkait dengan Jepang. Baik Korea Selatan dan Jepang menyetujui kesepakatan kerjasama tersebut sebab GSOMIA merupakan kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan kedua negara dalam menjaga keamanan wilayah. Pada era Lee Myung-bak ini, kerjasama GSOMIA telah masuk pada pembahasan dan akan masuk pada tahap penandatanganan kesepakatan. Akan tetapi setelah terjadi penolakan keras dari pihak parlemen dan publik Korea Selatan, Presiden Lee membatalkan kerjasama tersebut, sehingga realisasi dari kerjasama GSOMIA tidak dapat terwujud.

Setelah pergantian kepemimpinan presiden Korea Selatan tahun 2013, Park Geun Hye terpilih menjadi presiden Korea Selatan menggantikan Presiden Lee Myung Bak. Di awal kepemimpinannya, Presiden Park mendapat simpati dari masyarakat Korea Selatan sebab pada masa pemilihan, Park Geun Hye berada pada pihak oposisi ditunjukkan dengan mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Lee, sehingga elektabilitas Presiden Park meningkat. Namun, disisi lain hubungan Korea Selatan dengan Jepang di era tersebut sempat merenggang. Hal ini bermula dari kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke kuil Yasukuni serta sikap keras yang ditunjukkan Presiden Park pada Jepang untuk tidak melakukan pertemuan dengan

---

<sup>57</sup> Azeem Nur Taqwim. 2019. "Dinamika Politik Korea Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Proses Kesepakatan General Security of Military Information Agreement Periode 2013-2016" Skripsi Universitas Islam Indonesia. Hal . 16

<sup>58</sup> *Ibid* hal 17.

Jepang selama dua tahun.<sup>59</sup> Kondisi tersebut tidak berlangsung cukup lama, setelah Amerika Serikat sebagai negara aliansi mendorong Korea Selatan untuk meningkatkan hubungannya dengan Jepang.

Pertemuan pertama Presiden Park Geun Hye dengan Shinzo Abe didukung oleh Amerika Serikat dalam *Nuclear Summit Security* pada tahun 2014.<sup>60</sup> Pada pertemuan ini terjadi pembahasan mengenai kesadaran masing-masing negara terhadap pentingnya keamanan negara dari ancaman nuklir. Korea Selatan dan Jepang saling memahami kebutuhan negara terhadap keamanan wilayahnya. Selain itu, ancaman nuklir yang berasal dari Korea Utara juga semakin meningkat ditandai dengan beberapa kali provokasi sejak tahun 2010. Oleh karena itu, perjanjian GSOMIA yang sebelumnya sempat tertunda akibat terjadi penolakan oleh publik dan parlemen, pada era Presiden Park Geun Hye kembali dibahas.

Peningkatan hubungan Korea Selatan dan Jepang secara signifikan juga ditandai dengan adanya upaya penyelesaian isu *comfort women* pada tanggal 27 Desember 2015. Dalam pertemuan tersebut, Jepang sepakat untuk memberi kompensasi dan menyatakan permintaan maaf kepada korban *comfort women* sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penyesalan terhadap kejadian di masa lalu.<sup>61</sup> Terwujudnya penyelesaian isu *comfort women* di tahun tersebut menandakan Korea Selatan dan Jepang memiliki pandangan yang lebih positif terhadap isu sejarah yang selama ini menghambat hubungan diplomatik kedua negara.

Namun keadaan berbeda pada pihak masyarakat serta organisasi yang terkait dengan solidaritas *comfort women*. Salah satu pihak yang paling berpengaruh pada isu ini, yakni *Korean Council for The Women Drafted for Military Slavery by Japan* melakukan protes terhadap kesepakatan *comfort women* yang dinilai kurang memuaskan. Pihak tersebut menolak penyelesaian isu *comfort women* yang telah disepakati dengan alasan penyelesaian tersebut meninggalkan

---

<sup>59</sup> BBC.2020. "Yaskuuni Shrine : Japan Ex: PM Abe Visits Controversial Memorial". Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-54216632> pada 23 Mei 2022.

<sup>60</sup> Eunjung Lim.2016. "The Nuclear Security Summit : Trilateral Considerations of North Korea's Nuclear Program". Diakses melalui <https://www.nbr.org/publication/the-nuclear-security-summit/> pada 23 Mei 2022.

<sup>61</sup> Kazuya Fukoka. 2016. "A Critical Appraisal of the 'Comfort Women' Agreement Between Japan and South Korea". Diakses melalui <https://www.e-ir.info/2016/03/30/appraising-the-comfort-women-agreement-between-japan-and-south-korea> pada 25 Mei 2022.



poin utama dari isu *comfort women* yakni pertanggungjawaban secara hukum dan pengakuan kepada publik bahwa *comfort women* merupakan kejahatan sistematis yang dilakukan oleh negara.<sup>62</sup>

Ditengah isu pembahasan kerjasama GSOMIA yang akan dilaksanakan Korea Selatan dan Jepang, serta adanya penolakan dari solidaritas *comfort women* terhadap penyelesaian isu *comfort women* yang dianggap kurang memuaskan, Presiden Park justru terlibat dalam skandal bersama dengan Choi Soon-Sil. Presiden Park diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan timbulnya tuntutan publik untuk memakzulkan Presiden Park.<sup>63</sup> Ditengah kondisi tersebut, sikap Presiden Park justru cenderung kontroversial dengan tidak mendengarkan opini publik dan membuat keputusan secara sepihak. Hal ini terbukti ketika Presiden Park menyetujui kerjasama GSOMIA pada 23 November 2016.

**Gambar 2.4.**  
**Penandatanganan Kerjasama GSOMIA oleh Menteri Pertahanan**  
**Korea Selatan Han Min-ko dan Duta Besar Jepang untuk Korea**  
**Selatan Yasumasa Nagamine.**



Sumber : The Korea Times. 2016. “Korea-Japan Dispute Spread to Security”. Diakses melalui [https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/07/120\\_272577.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/07/120_272577.html) pada 25 Mei 2022.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Konstantin Atmolov.2016. “The Scandal Surrounding Park Geun-hye and Choi Son-sil The Defendant’s Arrest and Prime Minister’s Resignation”. Diakses melalui <https://journal-neo.org/2016/11/05/the-scandal-surrounding-park-geun-hye-and-choi-soon-sil-the-defendants-arrest-and-prime-ministers-resignation/> pada 25 Mei 2022.

Kerjasama GSOMIA disepakati kedua negara sebagai bentuk keberlanjutan pertemuan Korea Selatan dan Jepang pada *Nuclear Summit Security* di Hague. Namun, kerjasama tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat serta pihak parlemen. Respon negatif masyarakat disebabkan akibat isu anti-Jepang yang masih bergulir di Korea Selatan. Kondisi tersebut semakin buruk karena solidaritas *comfort women* menilai penyelesaian kasus *comfort women* tidak mencapai poin terpenting, sehingga terjadi unjuk rasa menentang kesepakatan tersebut.

Selain itu, ketidaksetujuan parlemen ditunjukkan dengan pengajuan mosi terhadap kerjasama GSOMIA yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengajuan mosi tersebut menyatakan bahwa perjanjian GSOMIA menyangkut isu sejarah, sehingga perlu adanya pembicaraan terlebih dahulu dengan Majelis Nasional.<sup>64</sup> Selain itu, pihak parlemen juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan pengalihan isu terhadap skandal Park Geun Hye.

Disisi lain, adanya kesepakatan kerjasama GSOMIA merupakan sebuah pencapaian Presiden Park di era kepemimpinannya, setelah sebelumnya gagal disepakati oleh Presiden Lee. Selain itu, kerjasama ini juga menunjukkan adanya hubungan diplomatik yang meningkat dengan Jepang sebab hal tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi Korea Selatan khususnya dalam sektor keamanan.

---

<sup>64</sup> Sarah Kim. 2016. "Opposition Seeks Han's Dismissal" Diakses melalui <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3026248> pada 25 Mei 2022.

### **BAB III**

#### **FAKTOR KOREA SELATAN MENANDATANGANI KERJASAMA GSOMIA DENGAN JEPANG TAHUN 2016**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis mengenai latar belakang Korea Selatan dalam menyepakati Kerjasama GSOMIA dengan Jepang tahun 2016. Analisis menggunakan konsep Model Aktor Rasional oleh Graham T Allison berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan yakni *Goal, Alternative, Consequences dan Choice*. Dalam menjawab rumusan masalah secara khusus akan digunakan indikator *Choice* untuk mendeskripsikan latar belakang Korea Selatan dalam menyepakati kerjasama GSOMIA dengan Jepang.

Melalui konsep model aktor rasional seorang aktor atau pembuat keputusan akan menentukan kebijakannya berdasarkan rasionalisasi yang dimiliki oleh aktor tersebut. Rasionalisasi yang merupakan proses berfikir secara logis didasarkan pada kalkulasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang aktor. Dalam hal ini, Presiden Park Geun Hye sebagai aktor rasional membuat keputusan untuk menyepakati kerjasama GSOMIA yakni kemampuan militer Jepang serta adanya peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

#### **A. Kemampuan Militer Jepang**

Dalam menghadapi situasi keamanan dunia, pada tahun 2013 Shinzo Abe berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Peningkatan kapabilitas militer Jepang bertujuan agar Jepang memiliki kemampuan militer yang mumpuni, sehingga Jepang mampu merespon ancaman yang datang dari luar. Peningkatan tersebut terlihat dari perubahan tatanan militer Jepang melalui *National Security Strategy* (NSS).<sup>1</sup> NSS merupakan pedoman keamanan nasional yang pertama kali diadopsi oleh Jepang berfokus pada hubungan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Dalam NSS terdapat prinsip dasar yang dikenal sebagai “*proactive contribution of*

---

<sup>1</sup> Ria Putri Santoso dan Anak Agung Bayu Perwita. 2016. “The Shift and Continuity of Japanese Defense Policy : Revolutionary Enough ?” *Journal of ASEAN Studies*, Vol.4, No.2. Hal 163.

*peace*” yang bertujuan agar Jepang melakukan kontribusi secara aktif untuk mendukung stabilitas keamanan Asia Pasifik hingga dunia serta melakukan perombakan pada kebijakan pertahanan Jepang.<sup>2</sup> NSS secara khusus menyebutkan bahwa kapabilitas pertahanan merupakan penjamin utama keamanan nasional Jepang. Oleh karena itu, Jepang berupaya membangun arsitektur pertahanan yang komprehensif untuk mendukung terwujudnya pertahanan Jepang yang kuat.<sup>3</sup>

Melalui NSS, Menteri Pertahanan Jepang memberikan pandangannya terkait dengan kepentingan nasional Jepang dan *security objectives* dengan jelas, serta memberikan pendekatan strategis yang dapat diambil oleh Jepang untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Jepang memiliki tiga kepentingan nasionalnya terkait dengan keamanan, yakni menjaga keamanan, perdamaian, serta memastikan kelangsungan hidup masyarakat Jepang, mencapai kemakmuran, sehingga terwujud perdamaian, dan memelihara serta melindungi tatanan internasional berdasarkan nilai dan aturan universal.<sup>4</sup> Sedangkan untuk *security objectives*, Jepang memiliki 3 point penting yakni pertama, memperkuat sistem pertahanan untuk mencegah ancaman dari luar, sehingga menghalangi ancaman tersebut agar tidak secara langsung mencapai Jepang, kedua, untuk meningkatkan keamanan di kawasan Jepang perlu mempererat kerjasama serta aliansi dengan Amerika Serikat, ketiga, Jepang memiliki ambisi untuk meningkatkan keamanan di level global dan membangun *international community* yang damai, stabil dan sejahtera.<sup>5</sup>

Untuk mendukung postur keamanan Jepang, NSS di era Shinzo Abe juga mengatur *National Defense Program Guideline* (NDPG) 2014 yang merupakan petunjuk program keamanan untuk jangka panjang dalam kurun waktu satu dekade serta *Mid-Term Defense Program* (MTDP) sebagai program keamanan jangka

---

<sup>2</sup> Ministry of Defense. 2016. “National Security Strategy”. Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_policy/basis/strategy/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html) pada 11 Juni 2022.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ministry of Foreign Affairs. 2016. “Japan’s Security Policy”. Diakses melalui [https://www.mofa.go.jp/foreignpolicy/page1we\\_000081.html](https://www.mofa.go.jp/foreignpolicy/page1we_000081.html) pada 11 Juni 2022

<sup>5</sup> *Ibid*.

pendek dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2014 hingga 2018.<sup>6</sup> Perbedaan NDPG tahun 2010 dan 2014 sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Perbedaan NDPG 2010 dan NDPG 2014**

NDPG	Latar belakang	Ide dasar
NDPG 2010 disetujui 17 Desember oleh Dewan Keamanan / Kabinet <i>meeting</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perubahan pada keseimbangan kekuatan global.</li> <li>● Situasi keamanan yang kompleks di sekitar Jepang.</li> <li>● Diversifikasi peran militer dalam global <i>society</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membangun <i>Dynamic Defense Force</i> (tidak terikat pada konsep Kapabilitas Pertahanan Dasar atau <i>Basic Defense Capability</i>).</li> <li>● Memfasilitasi pertahanan yang efektif dan merespon berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Serta melakukan aktivitas secara proaktif untuk menstabilkan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan meningkatkan keamanan global secara dinamis.</li> </ul>
NDPG 2014 disetujui tanggal 17 Desember 2013 oleh Dewan Keamanan Nasional / Kabinet <i>meeting</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Situasi keamanan di sekitar wilayah Jepang semakin parah.</li> <li>● Rebalancing Amerika terhadap Asia Pasifik.</li> <li>● Pelajaran yang dipetik dari pengalaman SDF pada bencana gempa besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Membangun the <i>Dynamic Defense Force</i>.</li> <li>● Sebagai respon menanggapi keamanan di lingkungan yang semakin parah diwujudkan dengan melakukan aktivitas seperti : melindungi keunggulan laut serta melakukan program <i>air seamlessly</i> melalui operasi bersama.</li> </ul>

Sumber :Ministry of Defense Japan. 2014. "Japan Defense Focus". Diakses melalui [https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf\\_no49.pdf](https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_no49.pdf) pada 5 Agustus 2022

<sup>6</sup> Zachary Keck. 2013. "Japan to Approve New China-Centric Defense Posture". Diakses melalui <https://thediplomat.com/2013/12/japan-to-approve-new-china-centric-defense-posture/> pada 11 Juni 2022.

Dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa perbedaan NDPG 2010 dan 2014 terletak pada prinsip dasar pembuatan NDPG yakni pada latar belakang serta ide dasar. Kedua NDPG berfungsi sebagai pedoman Jepang dalam membuat kebijakan Jepang untuk jangka panjang, Namun dalam NDPG tahun 2014, Menteri Pertahanan Jepang menekankan pada peningkatan amunisi serta *manpower* yang tercantum dalam *The Dynamic Joint Defense Force* sebagai pusat keamanan Jepang. *The Dynamic Joint Defense Force* merupakan bentuk pertahanan yang menekankan pada kemampuan kesiapan (*readiness capability*), keberlangsungan (*sustainability*), konektivitas (*connectivity*), dan kekuatan (*reinforce*) melalui teknologi dan kemampuan C3+II (*Command, Control, Communication Intelligencies*) yang dimiliki oleh Jepang<sup>7</sup>. Hal ini ditujukan agar Jepang mampu merespon ancaman yang semakin meningkat di sekitar Jepang.

Sedangkan dalam *Mid-Term Defense Program* (MTDP), salah satu fokusnya yakni pada jumlah peralatan atau amunisi masing-masing angkatan, yakni Angkatan Darat (*Ground Self Defense Force*), Angkatan Laut (*Maritime Self Defense Force*) dan Angkatan Udara (*Air Self Defense Force*) sebagai bentuk memperkuat sistem pertahanan Jepang<sup>8</sup>. Sejak upaya Shinzo Abe meningkatkan kapabilitas militernya, hingga tahun 2016, total amunisi yang dimiliki oleh masing-masing angkatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Jumlah Aset Militer Jepang Tahun 2016**

Kategori	Jenis Peralatan	Jumlah (aset)
Angkatan Darat	Tangki	687
	Kendaraan tempur infanteri	68
	Kendaraan pengintai	162
	Kendaraan lapis baja	792
	Artileri penarik	422
	Tembakan <i>self-propelled</i>	166
	Beberapa sistem peluncuran roket	99
	Mortir	1.103

<sup>7</sup> Ministry of Defense. 2014. "Japan Defense Focus". Diakses melalui [https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf\\_no49.pdf](https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_no49.pdf) pada 10 Juni 2022.

<sup>8</sup> Ministry of Defense Japan. 2014. "Medium Term Defense Program". Diakses melalui <https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense Program.pdf> pada 10 Juni 2022.

	Misil <i>ground to air</i>	700
	Helikopter	412
	Pesawat terbang	8
Angkatan Laut	Kapal selam	18
	Destroyer	38
	Kapal pengawal	9
	Kapal penyapu ranjau	27
	Kendaraan <i>amphibious</i>	3
	Kapal pendaratan	8
	Kapal pembantu	28
	Helikopter	131
Angkatan Udara	Pesawat pengintai	17
	<i>Fighters</i>	348
	Pesawat transport	61
	Tanki	5
	Helikopter	46
	Pesawat EW	3

Sumber : *Defense White Paper* Korea Selatan. 2016. "Military Power of Neighbour Country". Diakses melalui [https://www.mnd.go.kr/cop/pblictn/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN\\_031300000000](https://www.mnd.go.kr/cop/pblictn/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_031300000000) pada 5 Agustus 2022.

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah peralatan militer pasukan keamanan Jepang cukup lengkap. Jumlah peralatan militer tersebut menunjukkan keseriusan Shinzo Abe dalam membangun kapabilitas militer Jepang yang kuat. Hal ini juga menandakan kesiapan Jepang dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar. Tidak hanya secara kuantitas, Jepang juga memiliki aset alutsista yang canggih, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Utara dan Cina. Beberapa diantaranya yakni seperti Hayabusa-Class Patrol Craft. Kapal tersebut merupakan kapal patroli cepat memiliki kemampuan untuk bertempur serta dapat bersembunyi dari musuh karena memiliki ukuran yang cenderung kecil, sehingga dapat menyerang dibalik gugusan pulau. Meskipun memiliki ukuran kapal yang kecil, kapal tersebut juga menyimpan empat rudal, seperti pada tipe kapal Atago serta dapat memiliki kecepatan penuh mencapai 46 knots. Oleh sebab itu, dengan

berbagai macam keunggulannya, kapal Hayabusa disebut sebagai kapal paling mematikan diantara armada lainnya.<sup>9</sup>

### Gambar 3. 1. Kapal Hayabusa



Sumber : Naval Technology. 2011. “Hayabusa Class Guided-Missile Patrol Boat”. Diakses melalui <https://www.naval-technology.com/projects/hayabusa-class/> pada 6 Agustus 2022.

Atago Class Aegis Destroyer merupakan salah satu kapal perang yang paling dapat diandalkan milik Jepang. Kapal perang tersebut memiliki kemampuan yang sangat hebat sebab kapal tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan pada saat kondisi perang. Namun, bagian terpenting dari kapal Atago ialah kapal tersebut memiliki fitur kombinasi antara sistem pengintai radar 1D Aegis dengan rudal udara. Kecanggihannya radar Aegis yakni mampu mendeteksi berbagai macam ancaman dari pesawat udara sejauh 100 mil serta mendeteksi kapal pesiar berisi rudal hingga mampu melawan serangan-serangan tersebut.<sup>10</sup>

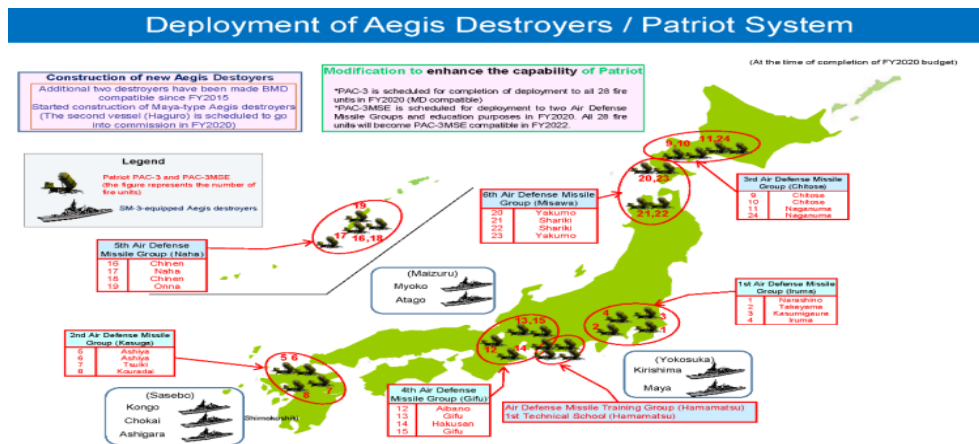
---

<sup>9</sup> Kyle Mizokami. 2015. “The Japanese Navy’s Most Lethal Weapons of War”. Diakses melalui <https://nationalinterest.org/feature/the-japanese-navy%E2%80%99s-5-most-lethal-weapons-war-13256> pada 11 Juni 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*



**Gambar 3. 2. Penyebaran Aegis Destroyer**



Sumber : Ministry of Defense Japan. 2016. "Missile Defense". Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_architecture/missile\\_defense/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_architecture/missile_defense/index.html) pada 6 Agustus 2022.

Dalam gambar di atas, penyebaran kapal aegis destroyer ditempatkan pada laut wilayah Shimokoshiki terdiri dari 3 destroyer, bagian wilayah Yokosuka terdiri dari 2 destroyer serta di wilayah Maizuru terdiri dari 2 destroyer.<sup>11</sup> Namun, melihat kecanggihan kapal Aegis Destroyer membuat Korea Utara juga meningkatkan kemampuan rudal balistiknya, sehingga Jepang kemudian menambah 2 unit jenis Aegis Destroyer dan Ashigara Destroyer menjadi 54 unit pada tahun 2015.<sup>12</sup> Selain itu, kapal Aegis juga dilengkapi dengan kombinasi sistem sonar dengan roket torpedo, sehingga mampu memburu dan menghancurkan kapal selam musuh di dalam lautan.

Keputusan Shinzo Abe dalam meningkatkan kapabilitas militer Jepang berhubungan erat dengan anggaran atau pengeluaran negara yang digunakan untuk pengeluaran militer Jepang. Anggaran militer dihitung berdasarkan seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas militer termasuk pengeluaran untuk pasukan keamanan, pelatihan militer serta perlengkapan militer.<sup>13</sup> Anggaran

<sup>11</sup> Ministry of Defense Japan. 2016. "Missile Defense". Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_architecture/missile\\_defense/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_architecture/missile_defense/index.html) pada 6 Agustus 2022.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> NATO. 2021. "Defence of Expenditure of NATO Countries (2014-2021)". Diakses melalui [https://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_184844.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184844.htm) pada 12 Juni 2022.

pengeluaran militer Jepang cenderung lebih besar dibandingkan dengan Korea Selatan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 3. Anggaran Militer Jepang dan Korea Selatan tahun 2012-2016**

Tahun	Jepang	Korea Selatan
2012	\$60,01 jt	\$31,95 jt
2013	\$49,02 jt	\$34,31 jt
2014	\$46,90 jt	\$37,55 jt
2015	\$42,11 jt	\$36,57 jt
2016	\$46,47 jt	\$36,89 jt

Sumber : Macro Trends. 2022. “South Korea Military Spending / Defense Budget 1960-2022. Diakses melalui <https://www.macrotrends.net/countries/KOR/south-korea/military-spending-defense-budget> pada 8 Agustus 2022.

Macro Trends. 2022. “Japan Military Spending / Defense Budeget 1960-2022. Diakses melalui <https://www.macrotrends.net/countries/JPN/japan/military-spending-defense-budget> pada 8 Agustus 2022.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Jepang memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Korea Selatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, pembagian anggaran militer terbesar yakni 42,9% untuk *maintenance* meliputi pendidikan dan pelatihan, perawatan medis, utilitas, *repair*, dan *petrol*. Selanjutnya 41% untuk *base measure* meliputi hibah komunitas, dukungan terhadap *host-nation*, serta sewa dan biaya kompensasi. Untuk penelitian dan pengembangan mendapatkan porsi sebesar 2,8%. Untuk pengadaan peralatan 3,3%, sedangkan untuk peningkatan fasilitas 3,6%, dan lainnya 6,4%.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan fakta diatas mengenai program-program yang dilakukan oleh Shinzo Abe untuk menghadapi ancaman dari luar, menunjukkan bahwa Jepang memiliki kemampuan militer yang mumpuni. Hal ini dilihat dari perubahan dari tatanan militer Jepang seperti perubahan dasar kebijakan militer, jumlah peralatan militer yang cukup lengkap dan canggih, serta anggaran militer Jepang yang besar. Adanya kemampuan tersebut, menjadi pertimbangan Korea

<sup>14</sup>Ministry of Defense Japan. 2016. “Defense Program and Budget of Japan”. Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_act/d\\_budget/pdf/280330.pdf](https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/280330.pdf) pada 5 Agustus 2022.

Selatan dalam menyepakati kerjasama GSOMIA antara lain terdapat pada aset pengawasan dan deteksi yang berkualitas.

Dalam *Defense White Paper* Korea Selatan tahun 2016, Korea Selatan menyatakan harapannya dengan menyepakati kerjasama GSOMIA bersama Jepang disebabkan Jepang memiliki kemampuan militer seperti aset pengawasan dan deteksi yang canggih serta berkualitas didukung dengan *budget* militer yang besar.<sup>15</sup>

*“Japan devotes a larger share of its national budget to defense than the ROK and possesses large, high-quality surveillance and detection assets including reconnaissance satellites, aegis ships, airborne early warning and control aircraft. hence, sharing video and other data with Japan, which possesses advanced intelligence-gathering and analyzing capabilities, can assist the ROK military in tracking and analyzing the trajectories of North Korean ballistic missiles and conducting technical analysis of its nuclear capabilities.”*<sup>16</sup>

(Jepang mencurahkan bagian yang lebih besar dari anggaran nasionalnya untuk pertahanan daripada Korea Selatan dan memiliki aset pengawasan dan deteksi yang besar dan berkualitas tinggi termasuk satelit pengintai, kapal aegis, pesawat terbang peringatan dini dan kontrol di udara. Oleh karena itu, berbagi video dan data lainnya dengan Jepang, yang memiliki kemampuan pengumpulan dan analisis intelijen tingkat lanjut, dapat membantu militer Korea Selatan dalam melacak dan menganalisis lintasan rudal balistik Korea Utara dan melakukan analisis teknis terhadap kemampuan nuklirnya)

Pemerintah Korea Selatan melihat kemampuan militer Jepang terutama melalui peralatan militer seperti satelit pengintai yang dapat menangkap gambar sekecil 30cm, *Aegis Destroyers* yang mampu mendeteksi radar dan mencegat rudal, *Airborne Early Warning* serta *Aircraft Control* sebagai aset yang canggih mampu mendeteksi aktivitas nuklir Korea Utara. Selain itu, Jepang juga memiliki radar darat dengan jangkauan minimal dapat dideteksi 1000 km serta 77 mesin bawah tanah yang dapat mendeteksi kapal selam, sehingga dengan kemampuan militer Jepang yang berkualitas, Korea Selatan mendapatkan informasi kredibel melalui

---

<sup>15</sup> Ministry of National Defense Republic of Korea. 2016. “Defense White Paper 2016”. Diakses melalui [https://www.mnd.go.kr/cop/pblict/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN\\_031300000000](https://www.mnd.go.kr/cop/pblict/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_031300000000) pada 13 Juni 2022.

<sup>16</sup> *Ibid.*

skema kerjasama GSOMIA yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau pergerakan Korea Utara.<sup>17</sup> Hal ini menguntungkan bagi Korea Selatan, sebab Korea Selatan belum memiliki mekanisme pertahanan seperti Jepang. Radar Korea Selatan pada tahun 2016 masih menggunakan *Swedish Arthur-K System* yang hanya dapat mendeteksi musuh sejauh 60 km.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, kemampuan militer Jepang menjadi salah satu alasan Korea Selatan menyetujui kerjasama GSOMIA dengan Jepang. Disisi lain, bagian Laut Timur yang tidak dapat dijangkau oleh Korea Selatan dapat dideteksi oleh Jepang, sebab Jepang memiliki radar X-Band yang ditempatkan di wilayah tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Defense White Paper Korea Selatan tahun 2016 sebagai berikut :

*“Furthermore, the east Sea bordering Japan’s territorial waters is within the reachable range of its intelligence assets. Therefore, information exchange with Japan will give the ROK military access to better and broader intelligence related to the activities of North Korean submarines and submarine-launched ballistic missiles in this sea area”*<sup>19</sup>

(Selain itu, Laut timur yang berbatasan dengan perairan teritorial Jepang berada dalam jangkauan aset intelijennya yang dapat dijangkau. Oleh karena itu, pertukaran informasi dengan Jepang akan memberi ROK akses militer ke yang lebih baik dan intelijen yang lebih luas terkait dengan aktivitas kapal selam Korea Utara dan balistik yang diluncurkan kapal selam rudal di wilayah laut ini)

Untuk melihat pemikiran rasional Presiden Park, dapat dinilai dari misi yang digunakan Presiden Park dalam membuat landasan kebijakan keamanan. Hal ini disebabkan karena misi tersebut merupakan buah pemikiran Presiden Park yang berarti adalah alasan disepakatinya kerjasama GSOMIA harus sejalan dengan pemikiran rasional Park Geun Hye yang tertuang dalam misi tersebut. Pada awal masa jabatannya tahun 2013, Presiden Park Geun Hye menyampaikan misi utama yang menjadi landasannya dalam membuat sebuah kebijakan militer, pertama yakni memiliki sistem pertahanan yang kuat (*deterrence*). Hal ini diartikan sebagai

---

<sup>17</sup> Nayoon Lee. 2016. “GSOMIA: Beneficial But Was The Timing Right ?”. Diakses melalui <https://keia.org/the-peninsula/gsomia-beneficial-but-was-the-timing-right/> pada 5 Agustus 2022.

<sup>18</sup> Ians. 2017. “Seoul Develops Radar System to Detect Pyongyang Artillery”. Diakses melalui <https://www.financialexpress.com/world-news/seoul-develops-radar-system-to-detect-pyongyang-artillery/639588/> pada 14 Agustus 2022.

<sup>19</sup> *Defense White Paper* Korea Selatan 2016. *Op.Cit.*

kesiapan militer Korea Selatan dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Kedua, diplomasi kepercayaan (*trust diplomacy*) yakni Korea Selatan berupaya membangun kepercayaan dengan negara-negara lain melalui jalur diplomasi dan membangun kepercayaan (*trust building*) dengan Korea Utara yang bertujuan untuk mencegah ancaman nuklir.<sup>20</sup> Salah satu misi Presiden Park yakni *deterrence* menunjukkan keselarasan dengan alasan Presiden Park Geun Hye menyepakati kerjasama GSOMIA, yakni dengan adanya kemampuan militer Jepang mampu menambah informasi terkait aktivitas Korea Utara bagi Korea Selatan, sehingga Park Geun-hye dapat mewujudkan sistem pertahanan yang kuat (*deterrence*).

Disisi lain, meskipun kondisi domestik Korea Selatan dalam keadaan sentimen terhadap Jepang serta terdapat kekecewaan publik terhadap rezim Park Geun Hye, hal tersebut tidak merubah keputusan Park Geun Hye untuk menyepakati kerjasama GSOMIA. Bagi Park Geun Hye, kesepakatan kerjasama GSOMIA merupakan sebuah pencapaian di masa jabatannya karena sebelumnya kerjasama GSOMIA tidak mencapai titik kesepakatan pada era Lee Myung Bak. Pencapaian tersebut didasarkan pada keinginan Presiden Park untuk membangun sistem pertahanan yang kuat bagi Korea Selatan. Hal ini menunjukkan pertimbangan kondisi domestik Korea Selatan bukan menjadi pilihan yang diambil oleh Presiden Park sebab terdapat urgensi yang lebih besar yakni terkait dengan keamanan wilayah Korea Selatan dari ancaman Korea Utara.

---

<sup>20</sup> Siska Ayu Anggraini. dan Faisyal Rani 2019. "Motivasi Park Geun Hye Meneraokan Kebijakan Trust Politik Dalam Menghadapi Korea Utara Pada Tahun 2013-2016" *Jurnal Online Mahasiswa* Vol.6 Hal.3 (9)

## **B. Peningkatan Aktivitas Nuklir dan Rudal Korea Utara**

Sejak terpisahnya Korea Utara dengan Korea Selatan, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam kondisi tidak stabil hingga menyebabkan kedua negara terlibat *Korean War*. Setelah berakhirnya *Korean War*, Korea Utara kembali mengembangkan nuklir sebagai bentuk pertahanan dari negara-negara lain. Korea Utara pertama kali memutuskan untuk mengembangkan nuklirnya sendiri pada tahun 1950an.<sup>21</sup> Berdasarkan *Association to the Federation of American Scientist* menyatakan bahwa nuklir Korea Utara memiliki kapasitas terendah dibandingkan dengan negara-negara pengembang nuklir lainnya. Namun demikian, dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan nuklir Korea Utara semakin maju. Hal ini disebabkan Korea Utara kini telah gencar meningkatkan aktivitas nuklirnya melalui uji coba yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.<sup>22</sup>

Perkembangan nuklir Korea Utara dipengaruhi oleh pemikiran Kim Il Sung yang menyatakan bahwa Korea Utara tidak perlu bergantung dengan negara lain, sebab Korea Utara akan mengembangkan nuklir sebagai bentuk pertahanan wilayahnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pada tahun 2010 Menteri Pertahanan Korea Utara menekankan kembali bahwa pengembangan senjata nuklir merupakan bagian dari *self defense* untuk mencegah serangan dari AS dan negara-negara aliansinya. Selain itu, Korea Utara juga menyatakan bahwa senjata nuklir yang dimilikinya tidak hanya sebagai bentuk pertahanan diri (*deterrence*), namun juga sebagai *bargaining power* dalam berdiplomasi dengan negara-negara di dunia.<sup>23</sup>

Disisi lain persepsi Korea Utara terhadap pengembangan nuklir sebagai bentuk perlindungan, justru membawa pengaruh buruk bagi stabilitas keamanan khususnya di kawasan Asia Timur. Oleh sebab itu, Korea Selatan dan negara-negara aliansinya berupaya melakukan denuklirisasi terhadap Korea Utara. Upaya

---

<sup>21</sup> Rennu Novia Saputri. 2016. "Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011)". *Journal of International Relations*. Vol 2, No.2, hal.119.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sony Irawan. *Op.Cit.* Hal.103

denuklirisasi dilakukan baik oleh Korea Selatan maupun dengan negara-negara aliansi seperti AS dan Jepang. Sejak tahun 2003, upaya denuklirisasi dilakukan melalui forum *six party talks* yakni perundingan nuklir oleh enam negara AS, Jepang, Korea Selatan, Cina, Rusia dan Korea Utara. Dalam perundingan tersebut, terjadi beberapa kali putaran untuk menghasilkan konsensus bersama. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2009, forum *six party talks* telah menghasilkan *Joint Statement* 2005 yang diimplementasikan dalam *Beijing Agreement* Februari 2007 dan Oktober 2007.<sup>24</sup> Namun, ternyata dalam pengimplementasian kesepakatan tersebut tidak terlaksana.

Tidak hanya melalui forum multilateral seperti forum *six party talks*, Korea Selatan sebagai negara yang secara langsung berhadapan dengan Korea Utara telah melakukan berbagai upaya denuklirisasi melalui kebijakan-kebijakan presiden di setiap kepemimpinan. Upaya denuklirisasi dilakukan baik melalui dialog, kerjasama maupun forum. Di setiap era kepemimpinan, presiden Korea Selatan selalu menempatkan ancaman Korea Utara sebagai fokus utama kebijakan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman Korea Utara menjadi satu hal yang penting untuk diwaspadai. Tidak terkecuali pada era Presiden Park Geun-hye yang juga melakukan upaya untuk denuklirisasi Korea Utara.

Namun demikian, upaya denuklirisasi yang ditujukan untuk meredam aktivitas nuklir Korea Utara tidak memberikan hasil yang positif. Forum pertemuan *dalam six party talks* juga tidak membuat Korea Utara melakukan denuklirisasi. Bahkan Korea Utara justru keluar dari forum tersebut<sup>25</sup>. Presiden Kim Jong Un menyatakan bahwa untuk menghadapi senjata nuklir harus dilawan dengan senjata nuklir pula.<sup>26</sup> Respon negatif Korea Utara kembali dilakukan dengan meningkatkan aktivitas nuklirnya dari tahun ke tahun. Uji coba nuklir kembali meningkat terlihat pada rentang tahun 2012 hingga 2016. Pada April tahun 2012, Korea Utara meluncurkan roket melalui *Sohae Satellite Launching Station* di bagian barat daya wilayah Korea Utara. Pada peluncuran tahap pertama, terdiri dari empat rudal

---

<sup>24</sup> Muhammad Nabil. 2014. "Diplomasi Multilateral Six Party Talks dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-3009" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 56.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

balistik jarak menengah *Nodong*, tahap kedua rudal balistik jarak menengah jenis BM-25 Musudan yang mengalami gagal luncur<sup>27</sup>

Pada tahun 24 Januari 2013, Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara kembali mengumumkan rencana uji coba nuklir dan peluncuran roket. Hal ini terbukti pada 12 Februari 2013, *The Comprehensive Test Ban Treaty Organization* (CTBTO), yakni organisasi yang berfokus untuk memverifikasi larangan uji coba nuklir, melihat adanya aktivitas seismik dengan karakteristik seperti ledakan di dekat wilayah uji coba nuklir Korea Utara tahun 2006 dan 2009. Di tahun ini, Korea Utara juga tengah berupaya mengembangkan reaktor nuklir di Yongbyon.<sup>28</sup>

Ancaman dari Korea Utara kembali terlihat pada 21 Maret 2014 dengan menembakan 30 roket jarak menengah ke arah Laut Jepang. Atas penembakan tersebut, Korea Utara banyak dikecam oleh berbagai negara dan organisasi, termasuk Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa peluncuran rudal Korea Utara melanggar resolusi PBB. Namun, Korea Utara justru mengancam akan melakukan uji coba nuklir dalam bentuk yang baru. Hal ini dicurigai bahwa bentuk ancaman baru tersebut berkaitan dengan membuat perangkat nuklir berukuran lebih kecil yang dapat diaplikasikan dalam rudal balistik. Tidak hanya itu, melalui citra satelit Korea Utara juga memperluas situs utama peluncuran roket. Hal ini memungkinkan Korea Utara untuk meluncurkan roket dengan muatan yang lebih banyak. Oleh sebab itu, Korea Selatan juga berupaya untuk melakukan uji coba rudal sebagai bentuk pertahanan dari ancaman Korea Utara.<sup>29</sup>

Peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara terjadi cukup signifikan pada tahun 2015 hingga 2016. Setidaknya pada bulan Februari 2015, Korea Utara telah melakukan dua kali uji coba, yakni uji coba kapal selam anti misil serta uji coba lima rudal balistik dari wilayah Wonsan. Hingga akhir tahun 2015, Korea Utara telah beberapa kali melakukan uji coba misil balistik melalui kapal selam. Puncaknya pada bulan Januari 2016, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir ke empat serta meledakkan bom hidrogen untuk pertama kalinya. Setelah

---

<sup>27</sup> ACA. 2022. "Chronology of US-North Korea Nuclear and Diplomacy". Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#2012> pada 26 Juli 2022.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sony Irawan, *Op.Cit.*



beberapa kali gagal dalam uji coba Musudan misil, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke lima pada bulan September 2016.<sup>30</sup> Korea Utara juga menyatakan bahwa uji coba nuklir ke-enam akan segera dilakukan kembali setelah keberhasilan uji coba nuklir ke-lima. Hal ini membuat Korea Utara kembali dikecam oleh berbagai pihak internasional, sebab tidak hanya membahayakan stabilitas keamanan kawasan Asia Timur dan dunia, akan tetapi berbahaya pula bagi lingkungan sebagai dampak uji coba tersebut.<sup>31</sup>

**Tabel 3.4. Ancaman Korea Utara Tahun 2012 - 2016**

<b>Waktu</b>	<b>Aktivitas</b>
April 2012	Peluncuran roket <i>Nodong</i> dan roket BM-25 <i>Musudan</i> .
Januari 2013	Uji coba nuklir dan peluncuran roket serta pengembangan reaktor nuklir di Yongbyon.
Maret 2014	Penembakan roket jarak menengah kearah Laut Jepang.
Februari 2015	Uji coba kapal selam anti misil dan uji coba 5 rudal balistik dari wilayah Wonsan.
Januari 2016	Uji coba nuklir dan meledakkan bom hydrogen.
September 2016	Uji coba nuklir.

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2022.

Untuk melihat alasan Park Geun-hye menyepakati kerjasama GSOMIA dapat dilihat dari serangkaian peningkatan aktivitas nuklir dan rudal milik Korea Utara yang terlihat dalam tabel 3.5, membuat Korea Selatan semakin waspada akan ancaman baru yang akan dilakukan oleh Korea Utara. Pada peluncuran uji coba nuklir pada tahun 2016 dilakukan secara berturut-turut hingga peluncuran rudal setidaknya 20 kali termasuk rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Dalam *Defense White Paper* Korea Selatan tahun 2016, menyebutkan bahwa setelah penyerangan tersebut membuat Menteri Pertahanan meninjau dan mengkaji kembali perlunya penguatan postur militer Korea Selatan, sehingga hal tersebut

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

menjadi alasan Korea Selatan menyepakati kerjasama GSOMIA.<sup>32</sup> Korea Selatan melihat dengan adanya kerjasama GSOMIA dapat menghalau nuklir dan misil Korea Utara secara efektif seperti yang tercantum dalam *Defense White Paper* Korea Selatan tahun 2016 sebagai berikut :

*“In November 2016, the ROK-Japan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) was concluded to effectively deter North Korean nuclear and missile threats by utilizing Japanese intelligence capabilities to enhance the ROK’s security benefits”*<sup>33</sup>

(Pada November 2016, *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) Korea Selatan-Jepang disimpulkan untuk secara efektif menangkal ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dengan memanfaatkan kemampuan intelijen Jepang untuk meningkatkan manfaat keamanan Korea Selatan)

Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan keamanan Korea Selatan. Oleh sebab itu, perlu adanya perhitungan di situasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan, Han Min-ko *“a necessary measure in a situation where North Korea’s nuclear and missile threats are becoming a reality”*<sup>34</sup> (diperlukan perhitungan dalam situasi di mana ancaman nuklir dan rudal Korea Utara menjadi kenyataan). Oleh karena itu, aktivitas nuklir Korea Utara menjadi salah satu alasan Korea Selatan menyepakati kerjasama GSOMIA.

Pada awal kepemimpinan Presiden Park Geun Hye menyatakan dalam pidato pelantikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Park memiliki visi yang ditumpukan pada kebahagiaan dan harapan *“a new era of people’s happiness and hope”*. Hal ini disebabkan, ukuran kebahagiaan tiap individu akan menjadi ukuran kekuatan nasional, dan semua individu akan menikmati kekuatan nasional tersebut *“the size of each person’s happiness will become the size of national power, and all people will enjoy the national power”*.<sup>35</sup> Park Geun Hye yang mulai menjabat

---

<sup>32</sup> Ministry of National Defense Republic of Korea. 2016. “Defense White Paper 2016”. Diakses melalui [https://www.mnd.go.kr/cop/pblict/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN\\_031300000000](https://www.mnd.go.kr/cop/pblict/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_031300000000) pada 6 Agustus 2022.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Korea JoongAng Daily. 2016. “Park Was Behind Rush to Conclude GSOMIA, Says Official”. Diakses melalui <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3026296> pada 6 Agustus 2022.

<sup>35</sup> Nae-Young Lee. 2014. “Vision and Policy Direction of the Park Geun-hye Administration and its East Asia Diplomacy”. *The Gakushuin Journal of International Studies*. Vol.1 Hal.66

sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 2013, melihat adanya ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai ancaman serius. Oleh sebab itu, melalui kebijakan luar negerinya, Presiden Park menempatkan sistem pertahanan yang kuat merupakan bagian dari prioritas kebijakan yang ingin diwujudkan. Hal ini disebabkan, tujuan kebijakan luar negeri yang ingin dicapai oleh Presiden Park ialah mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.

Kerjasama GSOMIA yang merupakan kerjasama secara khusus berfokus pada aktivitas nuklir Korea Utara menjadi salah satu alasan Presiden Park bersedia meninjau ulang kerjasama tersebut hingga mencapai kesepakatan pada pertengahan November 2016. Skema kerjasama GSOMIA yang memungkinkan Korea Selatan mendapatkan informasi mengenai aktivitas nuklir Korea Utara dapat mendukung sistem pertahanan yang ingin dicapai oleh pemerintah Korea Selatan dibawah kepemimpinan Presiden Park. Dalam merespon peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara, Presiden Park menyatakan pemerintah akan menggunakan langkah-langkah yang lebih keras dan efektif untuk menghadapi Korea Utara, termasuk dengan bekerjasama dengan negara-negara aliansi seperti Amerika dan Jepang.<sup>36</sup>

*“From this moment on, the government will employ tougher and more effective measures to create an environment in which the North Korea keenly realize that nuclear development doesn’t offer the path to survival but will merely hasten the regime’s collapse, and therefore has no choice but to change of its own volition. In the process, solidarity with our ally the US, as well as trilateral cooperation with the U.S and Japan, will be enhanced”<sup>37</sup>*

(Mulai saat ini, pemerintah akan menggunakan langkah-langkah yang lebih keras dan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan di mana Korea Utara dengan tajam menyadari bahwa pembangunan nuklir tidak menawarkan jalan untuk bertahan hidup tetapi hanya akan mempercepat keruntuhan rezim, dan oleh karena itu tidak punya pilihan selain mengubah kemauannya sendiri. Dalam prosesnya, solidaritas dengan sekutu kami AS, serta kerja sama trilateral dengan Amerika dan Jepang, akan dijalani)

---

<sup>36</sup> Arirang Issue. 2016. “President Park Geun-hye on North Korea”. Diakses melalui <https://youtu.be/h6nbQe4u3Tk> pada 26 Juli 2022.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara merupakan salah satu alasan Presiden Park Geun-hye menyetujui kerjasama GSOMIA. Rasionalisasi dari pemikiran Presiden Park yakni untuk mewujudkan sistem pertahanan Korea Selatan sebagai bentuk misinya membuat kebijakan keamanan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan negara lain, khususnya Jepang dalam kerjasama GSOMIA. Kerjasama GSOMIA menjadi penting bagi Korea Selatan, sebab segala bentuk pergerakan Korea Utara yang hanya dapat dideteksi oleh Jepang bermanfaat bagi Korea Selatan untuk mewujudkan sistem pertahanan yang kuat.

## BAB IV

### KESIMPULAN

*General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) merupakan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang dalam bidang keamanan. Melalui skema kerjasama GSOMIA, kedua negara dapat berbagi informasi mengenai aktivitas nuklir Korea Utara yang tidak dapat dijangkau oleh masing-masing negara. Pada tahun 2012, kerjasama GSOMIA hampir mencapai kesepakatan, akan tetapi setelah adanya penolakan dari publik dan parlemen membuat kerjasama tersebut gagal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan domestik yang menghambat kesepakatan kerjasama GSOMIA.

Pada tahun 2016, kerjasama GSOMIA akhirnya disepakati meskipun penolakan dari publik dan parlemen terhadap kerjasama tersebut masih kuat. Presiden Park Geun-hye yang pada era tersebut menjabat sebagai presiden Korea Selatan, memiliki pertimbangan tersendiri hingga membuat kerjasama GSOMIA dapat disepakati. Melalui teori Model Aktor Rasional oleh Graham T Allison menjelaskan bahwa seorang aktor akan berupaya membuat sebuah kebijakan yang dianggap paling rasional dengan memperhitungkan tujuan dan kalkulasi pemerintah.

Untuk mengetahui latar belakang Presiden Park Geun-hye dalam menyepakati kerjasama GSOMIA digunakan indikator *Choice*, yakni karena kemampuan militer serta meningkatnya aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada rasionalisasi yang dilakukan oleh Presiden Park sebagai aktor rasional. Kedua faktor tersebut menjadi alasan Park Geun-hye akhirnya memilih untuk menyepakati kerjasama GSOMIA, meskipun terdapat penolakan secara domestik.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam memutuskan kerjasama dengan negara lain terdapat alasan-alasan sebagai bentuk pertimbangan oleh pembuat kebijakan. Seorang aktor rasional memiliki berbagai informasi yang kemudian dikalkulasikan berdasarkan untung-rugi yang didapatkan apabila memilih salah satu kebijakan hingga diputuskan satu kebijakan. Oleh sebab

itu, aktor rasional dalam hal ini ialah seorang presiden memiliki pengaruh yang besar terhadap proses *decision making*. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa perbedaan kepemimpinan akan menghasilkan kebijakan yang berbeda pula, meskipun dalam kondisi yang sama. Sebab, pertimbangan masing-masing aktor berbeda sesuai dengan rasionalisasi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Dalam hubungan internasional, proses *decision making* yang dilakukan aktor rasional penting untuk diketahui sebab hal tersebut merupakan bagian dari perilaku negara sebagai aktor dalam hubungan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al Syahrin, M Najeri . 2018. *Keamanan Asia Timur : Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Yogyakarta : Komoyo Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawam, Asep & Endang Sulastri. 2017. *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ PRESS.
- Yoon, Yang Seung & Nur Aini Setiawati. 2003. *Sejarah Korea Selatan Sejak Awal Berdiri Hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta : Gajah Mada Univ Press.

### Jurnal :

- Anggraini, Siska Ayu. dan Faisyal Rani 2019. "Motivasi Park Geun Hye Menerapkan Kebijakan Trust Politik Dalam Menghadapi Korea Utara Pada Tahun 2013-2016" *Jurnal Online Mahasiswa* Vol.6 Hal. 1-9
- Fiqri, Harry, dkk. 2016. "Perbandingan Kebijakan Korea Selatan Era Lee Myung Bak dan Park Geun Hye Terhadap Jepang Terkait Isu Kuil Yaskuni Sebagai Simbol Kejahatan Perang". *Journal of International Relation*, Vol.2. No.4. Hal 1-6.
- Irawan, Sony. 2017. "Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Nuklir Korea Utara" *Jurnal International & Diplomacy USNI*. Vol.3, No.1. Hal.101-120
- June, Park Young. 2016. "South Korea Diplomacy and The Evolution of Korea-Japan Security Relations 1965-2015" *Seoul Journal of Japanese Studies* Vol.2, No.1. 2016. Hal.1-30.
- Kamiya, Fuji . 2018. "The Korean Peninsula After Park Chung Hee". *Japanese Perspectives on International Developments*, Vol. 20, No.27. Hal.1-9
- Kogotani, Koji, dkk. 2013. "Democracy and Diversionary Incentives in Japan - South Korea Disputes". *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 14 No. 1. Hal 1-26.

Laimeheriwa, Olinda L . 2015. “Analisis Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)”. *Jurnal Korean War, Kajian Strategis dan Studi Keamanan*. Hal. 1-21.

Lee, Nae-Young. 2014. “Vision and Policy Direction of the Park Geun-hye Administration and its East Asia Diplomacy”. *The Gakushuin Journal of International Studies*. Vol.1 Hal.1-19.

Park, Jae-Joe. “Cost-Benefit Analysis of the South Korea and Japan General Security of Military Information Agreement”. *Korea Institute for National Unification*. Hal. 1-4.

Pastreic, Emanuel . 2005. “The Balancer : Roh Moo-hyun’s Vision of Korean Politics and The Future of Northeast Asia”. *The Asia Pacific Journal* Vol.3 Issue.8. Hal. 1-14.

Pringgodigdo, Indrayanti. 2019. “Kebijakan Penempatan Sistem Anti Rudal Amerika Serikat di Korea Selatan” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.7 No.1. Hal 1-14

Santoso, Ria Putri dan Anak Agung Bayu Perwita. 2016. “The Shift and Continuity of Japanese Defense Policy : Revolutionary Enough ?” *Journal of ASEAN Studies*, Vol.4,No.2. Hal 1-21

Saputri, Renni Novia. 2016. “Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011)”. *Journal of International Relations*. Vol 2, No.2. Hal. 1-11

Syafitri, Utami Gita dkk. 2013. “Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan”. *Journal of USU International Law*. Vol 1, No.2. 2013. Hal. 1-21.

### **Skripsi :**

Marpaung, Edward Giovanny. 2017. “Aliansi Militer Amerika Serikat Dan Korea Selatan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016)”. Skripsi Universitas Komputer Indonesia.

Muhammad Nabil. 2014. “Diplomasi Multilateral Six Party Talks dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Taqwin, Azeem Nur. 2019. “Dinamika Politik Korea Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Proses Kesepakatan General Security of Military Information Agreement Periode 2013-2016” Skripsi Universitas Islam Indonesia.



## **Report :**

Ministry of Foreign Affairs Japan. 2016. "General Security of Military Agreement". Diakses melalui <https://www.mofa.go.jp/files/000205833.pdf> pada 13 Juni 2022

## **Internet :**

ACA. 2022. "Chronology of US-North Korea Nuclear and Diplomacy". Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#2012> pada 26 Juli 2022.

Arirang Issue. 2016. "President Park Geun-hye on North Korea". Diakses melalui <https://youtu.be/h6nbQe4u3Tk> pada 26 Juli 2022

BBC. 2016. "Korea Utara Tembakkan 3 Rudal Balistik". Diakses melalui [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160719\\_dunia\\_rudal\\_korut](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160719_dunia_rudal_korut) pada 28 Juni 2022.

BBC. 2020. "Yasukuni Shrine : Japan Ex: PM Abe Visits Controversial Memorial". Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-54216632> pada 23 Mei 2022.

BBC. 2018. "South Korea's Presidential Scandal". Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-37971085> pada 17 Feb 2022.

Byong-Su, Park. 2016. "Seoul and Tokyo Agree on Major Terms Military Information Agreement". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/769710.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/769710.html) pada 17 Feb 2022.

Cha, Victor. 2010. "The Sinking of the Cheonan". Diakses melalui <https://www.csis.org/analysis/sinking-cheonan> pada 17 Februari 2022

Chastain, Mary. 2016. "Leaders of US, Japan, South Korea, Meet to Form Response to North Korea Aggression". Diakses melalui <https://www.breitbart.com/national-security/2016/03/31/united-states-japan-south-korea-unite-nuclear-north-korea/> pada 3 Juli 2022.

Congressional Research Service (CSR). 2021. "South Korea : Background and US Relation". Diakses melalui <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10165.pdf> pada 16 April 2022.

- Eshel, Tamir. 2013. "New Anti-Missile Radar to Bolster Missile Defense Over The Pacific Ocean". Diakses melalui [https://defense-update.com/20130224\\_x-band\\_radar\\_in\\_japan.html](https://defense-update.com/20130224_x-band_radar_in_japan.html) pada 16 Agustus 2022.
- Fukoka, Kazuya. 2016. "A Critical Appraisal of the 'Comfort Women' Agreement Between Japan and South Korea". Diakses melalui <https://www.e-ir.info/2016/03/30/appraising-the-comfort-women-agreement-between-japan-and-south-korea>
- Gallup Report. 2016. "Daily Opinion No.236 Korea-Japan Military Cooperation". Diakses melalui <http://www.gallup.co.kr/gallupdb/report> 6 Feb 2022.
- Genron NPO. 2013. "The 1<sup>st</sup> Japan & South Korea Joint Opinion Poll". Diakses melalui [https://www.genron-npo.net/en/opinion\\_polls/archives/5263.html](https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5263.html) pada 1 Des 2021.
- Geodatos. 2022. "Distance from United States and South Korea". Diakses melalui <https://www.geodatos.net/en/distances/countries/from-united-states-to-south-korea> pada 24 Juni 2022
- Hun, Choe Sang. 2015. "Statues Placed in South Korea Honor 'Comfort Women' Enslaved for Japan Troops". Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/asia/south-korea-statues-honor-wartime-comfort-women-japan> pada 24 Nov 2021.
- Hankyoreh. 2006. "Roh Urges Japan to Sincerely Repent for Past Wrongdoing". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/149274.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/149274.html) pada 16 Mei 2022.
- Ians. 2017. "Seoul Develops Radar System, to Detect Pyongyang Artillery". Diakses melalui <https://www.financialexpress.com/world-news/seoul-develops-radar-system-to-detect-pyongyang-artillery/639588/> pada 14 Agustus 2022
- In-Moon, Chung & Won Young Hur. 2017. "A South Korean Perspective : Trilateral Co-operation : the Devil's in Domestic Politics". Diakses melalui [https://www.globalasia.org/v12no1/cover/a-south-korean-perspective-trilateral-co-operation-the-devils-in-domestic-politics\\_chung-in-moon-won-young-hur](https://www.globalasia.org/v12no1/cover/a-south-korean-perspective-trilateral-co-operation-the-devils-in-domestic-politics_chung-in-moon-won-young-hur) pada 16 April 2022.
- In-Hwan, Jung. 2016. "Despite Criticism, South Korea Sign GSOMIA with Japan". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/771627.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/771627.html) pada 17 Feb 2022.

- Ju, Jinyul. 2020. "Treaty on Basic 1965 Relations Between Japan and the Republic of Korea". Diakses melalui <https://thediplomat.com/tag/1965-treaty-on-basic-relations-between-japan-and-the-republic-of-korea/> pada 15 Mei 2022.
- Jun, Moon Young . 2012. "History Intrudes on Korea-Japan Security Cooperation". Diakses melalui <https://www.stimson.org/2012/history-intrudes-korea-japan-security-cooperation/> pada 14 Feb 2022.
- JS Japan.2015. "Yasukuni Shrine, Spirits of Soldiers Are Enshrined As God". Diakses melalui <http://www.jsjapan.com/archives/558> pada 25 Mei 2021
- J Ward, Thomas dan William D Lay. 2018."The Origins and Implementation of the Comfort Women System". Diakses melalui <https://www.e-ir.info/2018/12/14/the-origins-and-implementation-of-the-comfort-women-system/> pada 25 Mei 2020.
- KBS Indonesia. 2005. "Upacara Peresmian Tahun Persahabatan 2005 Antara Korea Selatan dan Jepang". Diakses melalui [http://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=i&Seq\\_Code=7551](http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=7551) pada 15 Mei 2022.
- Keck, Zachary. 2013. "Japan to Approve New China-Centric Defense Posture". Diakses melalui <https://thediplomat.com/2013/12/japan-to-approve-new-china-centric-defense-posture/> pada 11 Juni 2022.
- Kim, Sarah . 2016. "Opposition Seeks Han's Dismissal" Diakses melalui <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3026248> pada 25 Mei 2022.
- Konstantin, Atmolov. 2019. "A Tense Time for Relations Between Japan and South Korea : The GSOMIA and Moon's Relations with USA". Diakses melalui <https://journal-neo.org/2019/09/12/a-tense-time-for-relations-between-japan-and-south-korea-the-gsomia-and-moon-s-relations-with-the-usa/> pada 5 Februari 2022.
- Konstantin Atmolov.2016. "The Scandal Surrounding Park Geun-hye and Choi Son-sil The Defendant's Arrest and Prime Minister's Resignation". Diakses melalui <https://journal-neo.org/2016/11/05/the-scandal-surrounding-park-geun-hye-and-choi-soon-sil-the-defendants-arrest-and-prime-ministers-resignation/> pada 25 Mei 2022.
- Korea JoongAng Daily. 2016. "Park Was Behind Rush to Conclude GSOMIA, Says Official". Diakses melalui <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3026296> pada 6 Agustus 2022

- Lee, Nayoon. 2016. "GSOMIA: Beneficial But Was The Timing Right ?". Diakses melalui <https://keia.org/the-peninsula/gsomia-beneficial-but-was-the-timing-right/> pada 5 Agustus 2022.
- Lim, Eunjung .2016. "The Nuclear Security Summit : Trilateral Considerations of North Korea's Nuclear Program". Diakses melalui <https://www.nbr.org/publication/the-nuclear-security-summit/> pada 23 Mei 2022.
- Macro Trends. 2022. "South Korea Military Spending / Defense Budget 1960-2022. Diakses melalui <https://www.macrotrends.net/countries/KOR/south-korea/military-spending-defense-budget> pada 8 Agustus 2022.
- Macro Trends. 2022. "Japan Military Spending / Defense Budeget 1960-2022. Diakses melalui <https://www.macrotrends.net/countries/JPN/japan/military-spending-defense-budget> pada 8 Agustus 2022.
- Maps USA.2022."Peta Amerika Serikat". Diakses melalui <https://id.maps-usa.com/> pada 5 Agustus 2022.
- Mofa. 2006. "Special Message by President Roh Moo-hyun on Korea-Japan Relations". Diakses melalui [https://overseas.mofa.go.kr/does/brd/m\\_5794/view.do?seq=614951&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi itm seq=0&itm seq 1=0&itm seq 2=0&company cd=&company nm=&page=17](https://overseas.mofa.go.kr/does/brd/m_5794/view.do?seq=614951&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi itm seq=0&itm seq 1=0&itm seq 2=0&company cd=&company nm=&page=17) pada 15 Mei 2022.
- Ministry of Defense. 2014. "Japan Defense Focus". DIakses melalui [https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf\\_no49.pdf](https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_no49.pdf) pada 10 Juni 2022.
- Ministry of Defense Japan. 2014. "Medium Term Defense Program". Diakses melalui [https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense\\_Program.pdf](https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense_Program.pdf) pada 10 Juni 2022
- Ministry of Defense Japan. 2016. "Missile Defense". Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_architecture/missile\\_defense/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_architecture/missile_defense/index.html) pada 6 Agustus 2022.
- Ministry of Defense Japan. 2016. "Defense Program and Budget of Japan". Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_act/d\\_budget/pdf/280330.pdf](https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/280330.pdf) pada 5 Agustus 2022.
- Ministry of Defense. 2016. "National Security Strategy". Diakses melalui [https://www.mod.go.jp/en/d\\_policy/basis/strategy/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html) pada 11 Juni 2022.

- Ministry of Foreign Affairs. 2016. "Japan's Security Policy". Diakses melalui [https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we\\_000081.html](https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html) pada 11 Juni 2022
- Ministry of National Defense Republic of Korea. 2016. "Defense White Paper 2016". Diakses melalui [https://www.mnd.go.kr/cop/pblicitn/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN\\_031300000000](https://www.mnd.go.kr/cop/pblicitn/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_031300000000) pada 13 Juni 2022.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan . 2020. "Fact Sheet : Position Japan of Takeshima". Diakses melalui <https://www.us.emb-japan.go.jp/english/html/Position%20of%20Japan%20on%20Takeshima.pdf#:~:text=In%20January%201905%2C%20the%20Japanese%20government%20made%20a,Takeshima%20as%20a%20bombing%20range%20for%20US%20Forces.> pada 1 Desember 2021.
- Mizokami, Kyle. 2015. "The Japanese Navy's Most Lethal Weapons of War". Diakses melalui <https://nationalinterest.org/feature/the-japanese-navy%E2%80%99s-5-most-lethal-weapons-war-13256> pada 11 Juni 2022.
- NATO. 2021. "Defence of Expenditure of NATO Countries (2014-2021)". Diakses melalui [https://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_184844.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184844.htm) pada 12 Juni 2022.
- Naval Technology. 2011. "Hayabusa Class Guided-Missile Patrol Boat". Diakses melalui <https://www.naval-technology.com/projects/hayabusa-class/> pada 6 Agustus 2022.
- Nippon. 2014. "Yasukuni Shrine: The Basic". Diakses melalui <https://www.nippon.com/en/features/h00071/#:~:text=Initially%20Yasukuni%20Shrine%20was%20conceived%20as%20a%20place,the%20deceased%2C%20and%20then%20to%20honor%20them%20publicly.> Diakses pada 1 Juni 2022.
- NY Times. 2016. "South Korean Leader, Amid Scandal, Approves Intelligence Pact with Japan". Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2016/11/22/world/asia/south-korea-intelligence-sharing-japan.html> pada 14 Agustus 2022
- Oh, Kongdan. 2008. "US-ROK : The Forgotten Alliance". Diakses melalui <https://www.brookings.edu/opinions/u-s-rok-the-forgotten-alliance/> pada 25 Juni 2022.

- Panda, Ankit. 2014. "Shinzo Abe and Park Geun-hye Will Meet For The First Time On The Sidelines of The Nuclear Security Summit 2014" Diakses melalui <https://thediplomat.com/2014/03/shinzo-abe-park-geun-hye-to-meet-at-nuclear-security-summit/> 1 Juli 2022.
- Panda, Ankit. 2016. "US, Japan, South Korea Plan Missile Defense Exercise on RIMPAC 2016 Sidelines" Diakses melalui <https://thediplomat.com/2016/05/us-japan-south-korea-plan-missile-defense-exercise-on-rimpac-2016-sidelines/> pada 6 September 2016.
- Pawiroputro, Ekram. "Hukum Internasional Umum". Pustaka UT. Diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4310-M1.pdf> pada 5 Februari 2022.
- Park, Ju-min . 2016. "South Korea, Japan Agree Intelligence-Sharing on North Korea Threat". Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-military-idUSKBN13I068> pada 5 Februari 2022.
- Park, Sangbo . 2016. "Implications of General Security of Military Information Agreement for South Korea". Diakses melalui <https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/> pada 5 Februari 2022.
- Reuters. 2014. Obama Brings U.S Allies South Korea and Japan Together for Talks. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-japan-korea-trilateral-idUSBREA2O1OT20140325> pada 6 Agustus 2022.
- Reuters.2021. "Why Yasukuni Shrine is A Controversial Japan War Legacy". Diakses melalui <https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-08-13/explainer-why-yasukuni-shrine-is-a-controversial-symbol-of-japans-war-legacy> pada 20 Mei 2022.
- Reuters.2021. "Japan Lawmakers Visit Yasukuni Shrine, South Korea Protest". Diakses melalui <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-lawmakers-visit-yasukuni-shrine-south-korea-protests-2021-12-07/>. Diakses pada 1 Juni 2022.
- SAAB. 2009. "South Korea Accepts The First Arthur WLR System" Diakses melalui <https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2009/south-korea-accepts-the-first-arthur-wlr-system> pada 16 Agustus 2022.
- Sheen, Seongho dan Jina Kim. 2012. "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact". Diakses melalui <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb176.pdf?file=1&type=node&id=33602> pada 17 Feb 2022.

Shin-H. 2012. "Seoul Under Fire for Tokyo Military Pact". Diakses melalui <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120628001308> pada 5 Januari 2022.

Stubblafeld, Emma. 2018. "The Wednesday Protests : Comfort Women and Their Fight for Recognition". Diakses melalui <https://www.carolinapoliticalreview.org/editorial-content/2018/10/24/the-wednesday-protests-comfort-women> pada 25 Nov 2021.

The Obama White House 2014. "Remarks by President Barack Obama, President Park of the Republic of Korea and Prime Minister Abe of Japan". Diakses melalui <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/25/remarks-president-obama-president-park-republic-korea-and-prime-minister> pada 6 September 2022

The Obama White House. 2016. "Remarks by President Barack Obama, President Park Geun Hye and Prime Minister Shinzo Abe. Diakses melalui <https://youtu.be/-T3rsO7Q08Q> pada 4 Juli 2022.

USFK. "Mutual Defense Treaty Between United States and the Republic of Korea October 1, 1953". Diakses melalui [https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H\\_Mutual%20Defense%20Treaty\\_1953.pdf](https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H_Mutual%20Defense%20Treaty_1953.pdf) pada 24 Juni 2022.

Yun-Hyung, Gil. 2016. "South Korea and Japan First Hold Round of Talks on Military Info Sharing Agreement". Diakses melalui [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/768470.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/768470.html) pada 17 Feb 2022.